LAPORAN KINERJA TAHUN 2025







2026

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

(024) 8448755
pt-semarang.go.id
Jl. Pahlawan No. 19 Semarang

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Semarang, 26 Februari 2026

Pereviu I	Pereviu II
R. Seno Soeharjono Santoso, S.H., M.H	Drs. Muhamad Ashar, M.H.

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025 serta sebagai bentuk transparansi kinerja untuk memonitoring dan mengevaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Secara Umum capaian kinerja tahun 2025 telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tahun berikutnya.

Semarang, 26 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan sebuah lembaga peradilan umum sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat banding. Untuk itu seluruh kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Secara umum pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pada 12 (dua belas) indikator kinerja utama pada 3 (tiga) sasaran strategis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 11 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025

Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	100%	104,17
	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	100%	104,17
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,17
	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	99,86%	104,02
	Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	79,39%	105,85
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	3,94	103,41
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	77,24	108,01
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	99,71	103,86
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	95,34	103,46
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	100	104,17
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	85	101,19
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,3	3,3	100
Rata – Rata Capaian Kinerja				103,87

Sedangkan kinerja keuangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tahun 2025 sebagai berikut:

1. DIPA (01) BUA realisasi sebesar Rp57.106.319.265,- atau 99,50% dari total pagu anggaran, yaitu Rp57.390.630.000,-;
2. DIPA (03) BADILUM realisasi sebesar Rp473.124.232,- atau 98,13% dari total pagu anggaran, yaitu Rp482.135.000,-;

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN TELAH DI REVIU ii

KATA PENGANTAR iii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GRAFIK x

DAFTAR GAMBAR xi

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 2

B. Tugas dan Fungsi 3

C. Struktur Organisasi 5

D. Isu Strategis 8

E. Sistematika Penyajian 16

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 18

A. Rencana Strategis 2025 - 2029 19

1. Visi 20

2. Misi 20

3. Tujuan 20

4. Sasaran Strategis 20

5. Program dan Kegiatan 22

B. Rencana Kinerja Tahun 2025 31

C. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 31

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 33

E. REVISI Perjanjian Kinerja Tahun 2025 35

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025 37

A. Capaian Kinerja Organisasi 38

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 38

Halaman

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir 40
3. Membandingkan kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah 72
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Pengadilan Tinggi Lainnya 73
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja/Kendala 77
6. Analisis Atas Efisiensi Dalam Penggunaan Sumber Daya. 82
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 83
8. Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 89

B. Realisasi Anggaran 91
1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi 91
2. DIPA 03 Badan Peradilan Umum 96

BAB IV PENUTUP 102
A. Kesimpulan 103
B. Rekomendasi 106

LAMPIRAN

SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
SK Tim Pereviu Laporan Kinerja
Laporan Pengukuran Kinerja Bulanan dan Triwulan Tahun 2025
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025
Data Benchmarking Pengadilan Tingkat Banding
SK Penetapan Benchmark Pengadilan Tingkat Banding
Formulir Reviu Laporan Kinerja

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 v
Tabel 2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 3
Tabel 3. Uraian Tugas 5
Tabel 4. Daftar Pengadilan Negeri se Jawa Tengah 8
Tabel 5. Rancangan Renstra 2025-2029 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 24
Tabel 6. Revisi Renstra 2025-2029 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah . 26
Tabel 7. Rencana Kinerja Tahun 2025 31
Tabel 8. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 32
Tabel 9. Rencana Anggaran Kinerja Tahun 2025 33
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 33
Tabel 11. Capaian Kinerja Tahun 2025 34
Tabel 12. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 35
Tabel 13. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025 39
Tabel 14. Capaian Sasaran 1 Indikator 1 42
Tabel 15. Perbandingan Sasaran 1 Indikator 1 43
Tabel 16. Capaian Sasaran 1 Indikator 2 44
Tabel 17. Perbandingan Sasaran 1 Indikator 2 45
Tabel 18. Capaian Sasaran 1 Indikator 3 47
Tabel 19. Perbandingan Sasaran 1 Indikator 3 48
Tabel 20. Capaian Sasaran 1 Indikator 4 50
Tabel 21. Perbandingan Sasaran 1 Indikator 4 51
Tabel 22. Capaian Sasaran 1 Indikator 5 53
Tabel 23. Perbandingan Sasaran 1 Indikator 5 54
Tabel 24. Capaian Sasaran 2 Indikator 1 57
Tabel 25. Perbandingan Sasaran 2 Indikator 1 58
Tabel 26. Perbandingan Sasaran 3 Indikator 1 61

Tabel 27. Capaian Sasaran 3 Indikator 2 63
Tabel 28. Perbandingan Sasaran 3 Indikator 2 63
Tabel 29. Capaian Sasaran 3 Indikator 3 65
Tabel 30. Perbandingan Sasaran 3 Indikator 3 66
Tabel 31. Perbandingan Sasaran 3 Indikator 4 68
Tabel 32. Perbandingan Sasaran 3 Indikator 5 69
Tabel 33. Perbandingan Sasaran 3 Indikator 6 71
Tabel 34. Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 72
Tabel 35. Perbandingan Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 dengan Pengadilan Tinggi Lainnya..... 74
Tabel 36. Kegiatan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 83
Tabel 37. Reliasasi DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2025 93
Tabel 38. Realisasi Dipa Badan Peradilan Umum (03) Tahun 2025 96
Tabel 39. Matrik Rincian Realisasi Anggaran 2025 99
Tabel 40. Capaian dan Realisasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 103
Tabel 41. Realisasi Anggaran DIPA 01 105
Tabel 42. Realisasi Anggaran DIPA 03 106

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1. Capaian Sasaran 1 Indikator 1 43
Grafik 2. Capaian Sasaran 1 Indikator 2 46
Grafik 3. Capaian Sasaran 1 Indikator 3 48
Grafik 4. Capaian Sasaran 1 Indikator 4 51
Grafik 5. Capaian Sasaran 1 Indikator 5 54
Grafik 6. Capaian Sasaran 2 Indikator 1 58
Grafik 7. Capaian Sasaran 3 Indikator 2 64
Grafik 8. Capaian Sasaran 3 Indikator 3 66
Grafik 9. Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (01) 94
Grafik 10. Realisasi DIPA Badan Peradilan Umum (03) 97

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi	5
Gambar 2	Aplikasi SiLaper	11
Gambar 3	Aplikasi SIWAREG	12
Gambar 4	Aplikasi Kembang Desa	12
Gambar 5	Aplikasi Impian	13
Gambar 6	Aplikasi PTSP	13
Gambar 7	Aplikasi Sicoper	14
Gambar 8	Aplikasi Guardian Asset	14
Gambar 9	Aplikasi Simonevku	15
Gambar 10	Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	19
Gambar 11	Piagam Penghargaan Kemenpan RB	76
Gambar 12	Perolehan Sertifikat AMPUH dengan Predikat Unggul	77
Gambar 13	Pengahargaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	78
Gambar 14	HATIWASDA Sekaligus Asesor Terbaik	78
Gambar 15	Piagam Penghargaan dari KPPN Semarang II	79
Gambar 16	Piagam Penghargaan dari Kanwil DJPB Jawa Tengah	79
Gambar 17	Piagam Penghargaan dari Kanwil DJPB Jawa Tengah	80
Gambar 18	Piagam Penghargaan dari Biro Perlengkapan MA RI	80
Gambar 19	Piagam Penghargaan dari Sekretaris MA RI	81



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

A. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan suatu wujud nyata dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, penerapan di lingkungan internal Mahkamah Agung didukung oleh Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 878/BP/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan reformasi birokrasi pada area penguatan akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan dibawahnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis selama Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Bahwa dalam proses pengumpulan data kinerja, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan pengukuran realisasi kinerja dan rencana aksinya secara berkala. Data kinerja telah dikumpulkan dan dilaporkan tiap bulannya melalui BATARA. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mulai dari data-data kinerja dikumpulkan sampai dengan diukur dan validasi untuk disajikan serta dengan melakukan rapat evaluasi yang diikuti oleh pimpinan, seluruh pejabat struktural dan tim penyusun LKjIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Kemudian dari data yang sudah divalidasi dan dievaluasi dikompilasi dan disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan realisasi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memuat data kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang sudah disesuaikan dengan angka riil dan pelaporan kinerja relevansi data dengan Indikator Kinerja.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 dan 52, sebagai berikut:

Tabel 2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

TUGAS PENGADILAN TINGGI SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 PASAL 51 DAN 52
Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding
Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

SESUAI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009 PASAL 52A



Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan

Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan

Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

FUNGSI PENGADILAN TINGGI



Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan.



Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan



Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum

Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Gambar 1. Struktur Organisasi



Tabel 3. Uraian Tugas

URAIAN TUGAS
KETUA mempunyai tugas sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

<table>
<tr><th colspan="3">URAIAN TUGAS</th></tr>
<tr><td colspan="3">WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.</td></tr>
<tr><td colspan="3">HAKIM bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya</td></tr>
<tr><td>PANITERA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.</td><td colspan="2">SEKRETARIS mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.</td></tr>
<tr><td>PANMUD PIDANA bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang Bukti</td><td rowspan="2">BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusanan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan teknologi informasi.</td><td rowspan="2">BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.</td></tr>
<tr><td>PANMUD PERDATA bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata</td></tr>
<tr><td>PANMUD TIPIKOR bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara</td><td>SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & IT bertugas membantu Bagian Perencanaan dan</td><td>SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA bertugas membantu</td></tr>
</table>

URAIAN TUGAS		
yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan Barang bukti	Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.	Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolandan hubungan masyarakat.
PANMUD HUKUM bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.		
PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.	**SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN** bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.	**SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN** bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

D. ISU STRATEGIS

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pengadilan tingkat banding dan kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI yang membawahi 35 (tiga puluh lima) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

Tabel 4. Daftar Pengadilan Negeri se Jawa Tengah

NO	PENGADILAN NEGERI	KELAS
1	PN Niaga/HI/Tipikor Semarang	Kelas IA Khusus
2	PN Surakarta	Kelas IA Khusus
3	PN Pati	Kelas IA
4	PN Tegal	Kelas IA
5	PN Sukoharjo	Kelas IA
6	PN Klaten	Kelas IA
7	PN Sragen	Kelas IA
8	PN Cilacap	Kelas IA
9	PN Ungaran	Kelas IB
10	PN Negeri Demak	Kelas IB
11	PN Purwodadi	Kelas IB
12	PN Salatiga	Kelas IB
13	PN Kendal	Kelas IB
14	PN Magelang	Kelas IB
15	PN Mungkid	Kelas IB
16	PN Temanggung	Kelas IB
17	PN Wonosobo	Kelas IB
18	PN Kebumen	Kelas IB
19	PN Purworejo	Kelas IB
20	PN Kudus	Kelas IB
21	PN Jepara	Kelas IB
22	PN Blora	Kelas IB
23	PN Pekalongan	Kelas IB
24	PN Pemalang	Kelas IB
25	PN Slawi	Kelas IB
26	PN Brebes	Kelas IB
27	PN Boyolali	Kelas IB
28	PN Wonogiri	Kelas IB
29	PN Karanganyar	Kelas IB
30	PN Purwokerto	Kelas IB
31	PN Purbalingga	Kelas IB
32	PN Banjarnegara	Kelas IB
33	PN Batang	Kelas IB
34	PN Rembang	Kelas II
35	PN Banyumas	Kelas II

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu 2025, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjend Badan Peradilan Umum MA RI dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur serta memberikan kualitas pelayanan yang prima dan akuntabel, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dan etika. Pada tahun 2025 melakukan renovasi ruang PTSP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk meningkatkan pelayann public.
2. Pelaksanaan program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) sebagai salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Lingkungan Peradilan Umum adalah untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah mensosialisasikan dan melaksanakan program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) kepada seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Selanjutnya kegiatan sertifikasi ini berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus

senantiasa dipelihara dan dipertahankan. Pada tahun 2025 pelaksanaan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) untuk mengintegrasikan dengan program pemerintah lain seperti Pembangunan Zona.

3. Program Pembangunan Zona Integritas adalah program untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah mendapatkan predikat WBK dan WBBM harus mampu menumbuhkan budaya kinerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi, dan malayani public dengan baik. Penganugerahan penghargaan WBK pada tanggal 10 Desember 2019 dan penghargaan WBBM diberikan pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
4. Pelaksanaan kegiatan pengawasan daerah dan pembinaan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memastikan kinerja Pengadilan Negeri berjalan sesuai ketentuan. Tujuan program menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik, menjaga terlaksananya tertib administrasi, mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dan barang milik negara, meningkatkan kompetensi dan integritas tenaga teknis, meningkatkan tertib administrasi perkara, dan meningkatkan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum.
5. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Komponen penilaian SAKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi.
6. Mengadakan acara kegiatan Laporan Refleksi Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025. Merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas selama tahun 2025. Dalam Laporan Refleksi Kinerja Tahun 2025 disampaikan capaian kinerja yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selama tahun 2025, pencapaian kinerja tahun 2025, serta proyeksi kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2026. Dengan adanya kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan dalam meningkatkan capaian kinerja semua indikator kinerja. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Pengadilan Tinggi beserta pimpinan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah baik secara luring maupun daring.

7. Memelihara, membangun dan mengembangkan Inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan publik yaitu :

- **SILAPER (Siatem Informasi Layanan Perkara)**

Gambar 2. Aplikasi SiLaper



Silaper merupakan Asisten Virtual dan Sistem Informasi Layanan Perkara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Silaper dapat diakses Masyarakat melalui pesan whatsapp.

- **SIWAREG (Sistem Pengawasan Reguler)**

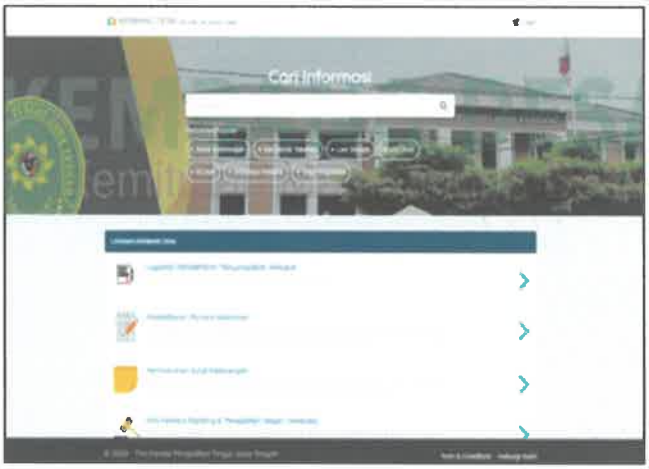
Gambar 3. Aplikasi SiWareg



SIWAREG Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah Sistem Informasi Pengawasan Reguler. Siwareg merupakan Sistem informasi layanan internal, pengembangan dari SILAPER yang bertujuan untuk melakukan pengawasan secara regular kepada Pengadilan Negeri secara online.

- **KEMBANG DESA (Kemitraan Membangun Desa)**

Gambar 4. Aplikasi Kembang Desa



Layanan Kembang Desa dapat diakses masyarakat melalui website dengan alamat https://kembangdesa.pt-semarang.go.id/. Kembang Desa adalah Layanan Pengadilan yang bertujuan memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

pencari keadilan dengan target utama adalah masyarakat pedesaan yang jauh akses ke Pengadilan di Kota/Kabupaten dan juga tidak terjangkau jaringan internet dengan memanfaatkan jaringan internet di Kantor Desa/ Kelurahan.

- **IMPIAN**

Gambar 5. Aplikasi Impian



Aplikasi IMPIAN merupakan layanan WhatsApp bot yang secara otomatis akan mengirimkan pesan terkait dengan proses berjalannya perkara sebagai pengingat pengisian SIPP Banding misal perkara yang masuk belum dinomori, perkara belum ditetapkan Majelisnya, perkara belum ditetapkan Panitera Penggantinya, perkara belum ditetapkan Hari Sidang dan lain-lain.

- **PTSP+**

Gambar 6. Aplikasi PTSP+



PTSP+ merupakan perbaruan aplikasi persuratan yang dulu sudah ada. Aplikasi ini menangani surat masuk, surat keluar

beserta disposisi dari pimpinan hingga ke pelaksana sehingga dapat terpantau pelaksanaannya. Selain itu dapat memonitor jumlah surat masuk dan surat keluar yang ditangani masing-masing bagian dan terdapat tambahan buku tamu untuk mendata tamu yang datang ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

- **SICOPER**

Gambar 7. Aplikasi Sicoper



SICOPER merupakan pembaruan aplikasi pengajuan cuti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebelumnya dan SICOPER bisa diakses secara online. SICOPER merupakan inovasi pengajuan cuti dan perizinan (izin terlambat, izin pulang cepat, izin keluar kantor) secara online untuk Hakim Tinggi dan pegawai Pengadilan Tinggi Jawa Tengah serta untuk Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

- **Guardian Asset**

Gambar 8. Aplikasi Guardian Asset



GUARDIAN ASSET SYSTEM adalah Suatu Aplikasi yang diperuntukkan untuk pengelolaan dan kontrol terhadap pemeliharaan Aset-aset berupa Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Terdapat 2 (dua) menu Utama pada aplikasi ini yaitu "Pemeliharaan Fasilitas" dan "Pemeliharaan Roda Empat" .

- **SIMONEVKU**

Gambar 9. Aplikasi Simonevku



Simonevku adalah aplikasi untuk memonitoring dan mengevaluasi capaian indikator kinerja utama pada Pengadilan Tinggi Semarang yang mengambil data sumber dari backup data SIPP sehingga pengukuran data kinerja valid dan terukur.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah:

1. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan Peradilan Umumnya.
2. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat

terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat banding tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

3. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan, pemahaman teknis dan penguasaan terhadap teknologi informasi.
4. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Pengadilan Tinggi Lainnya);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
8. Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. SK Tim Pereviu Laporan Kinerja
3. Laporan Pengukuran Kinerja Bulanan/Triwulan Tahun 2025
4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2025
5. Formulir Reviu Laporan Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

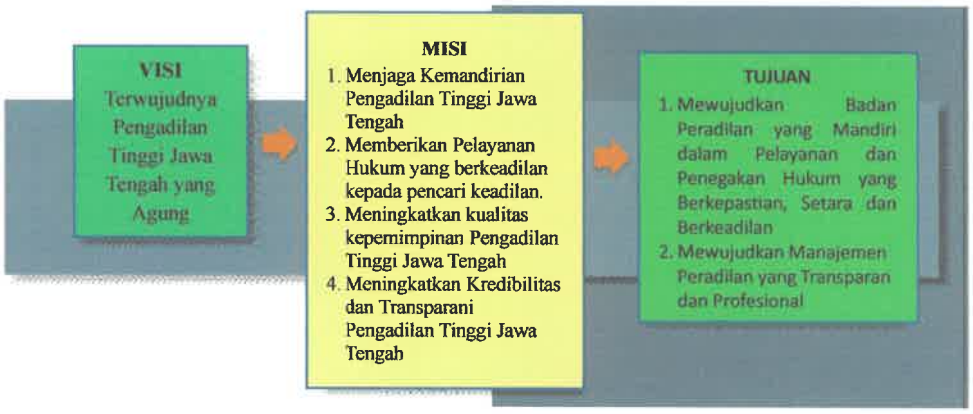
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025

A. RENSTRA 2025-2029

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 (lima) tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapainnya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai dilingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyusun Rencana Strategis 2025-2029 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat Visi dan Misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan program dan kegiatan. IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Gambar 10. Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



VISI

Visi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yaitu :"**Terwujudnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang Agung**" Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memilki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sesuai misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menggunakan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

   - Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
   - Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.
   - Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
   - Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.
   - Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu.

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

   - Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

   - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
   - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA).
   - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM).
   - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA).
   - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM).
   - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Program : Dukungan manajemen

   Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan, yaitu :

   a. Kegiatan: Pengadaan Sarana Dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

      Indikator Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana

      Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

      - Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

   b. Kegiatan: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

      Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional

      Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

      - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
      - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA).
      - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM).
      - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA).
      - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM).
      - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

2. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum

   Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum.

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat banding secara tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
- Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
- Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.
- Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu.

Tabel 5. Rancangan Renstra 2025-2029 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

NO	TUJUAN			SASARAN							STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET JANGKA MENENGAH (%)	URAIAN	INDIKATOR	TARGET (%)					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
						2025	2026	2027	2028	2029					
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasanny a terpenuhi	Index responden yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	95	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96	96	97	97	98	Program dukungan manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	1 layanan	**49.155.514.000**
					b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50	51	51	52	52					
					c. Indeks persepsi *stakeholder* hyang puasa terhadap layanan peradilan	96	96	97	97	98	Program dukungan manajemen	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI	Pengadaan sarana dan prasarana	1 Unit	**224.910.000**

NO	TUJUAN			SASARAN								STRATEGIS			
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET JANGKA MENENGAH (%)	URAIAN	INDIKATOR	TARGET (%)					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
						2025	2026	2027	2028	2029					
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	95	2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju	96	96	97	97	98	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat banding secara tepat waktu	1.202 perkara	**694.605.000**

Tabel 6. Revisi Renstra 2025-2029 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Tujuan	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	TARGET					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah								**57.872.766**	**74.377.917**	**78.095.764**	**82.000.552**	**86.100.579**	
		1. **Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**											Kepaniteraan
		1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	96%	97%	97%	97%						
		1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	96%	97%	97%	97%						
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	96%	96%	96%	96%						
		1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	96%	97%	97%	97%						
		1.5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	96%	96%	96%	96%						

		2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik											**Kepaniteraan dan Kesekretariatan**
		2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	3,82	3,83	3,84	3,85						
		3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional											**Kesekretariatan**
		1.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	71,52	71,53	71,54	71,55						
2.		1.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	96,15	96,30	96,45	96,60						
3.		1.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	95,00	95,15	95,30	95,45						
4.		1.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	96,01	96,02	96,03	96,04						
5.		1.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	85,80	85,81	85,82	85,83						
6.		1.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	3,31	3,32	3,33	3,34						

Mewujudkan Badan Peradilan Yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan													
	Program Penegakan dan Palayanan Hukum							**482.136**	**729.335**	**765.802**	**804.092**	**844.297**	
		01. Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang Pasti dan Berkeadilan											**Kepaniteraan**
		1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu											
		- Pidana	96%	96%	97%	97%	97%						
		- Perdata	96%	96%	97%	97%	97%						
		1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju											
		- Pidana	96%	96%	97%	97%	97%						
		- Perdata	96%	96%	97%	97%	97%						
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	96%	96%	96%	96%						

		1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	96%	97%	97%	97%						
		1.5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	96%	96%	96%	96%						
		02. Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum											**Kepaniteraan**
		2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	3,82	3,83	3,84	3,85						
Mewujudkan Badan Peradilan Yang Transparan dan Profesional													
	Program Dukungan Manajemen							**57.390.630**	**73.648.582**	**77.329.962**	**81.196.460**	**85.256.282**	
		01. Terlaksananya Dukungan Manajemen pada Kepaniteraan yang Prima dan Optimal											**Kesekretariatan**
		1.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	71,52	71,53	71,54	71,55						
		1.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	96,15	96,30	96,45	96,60						

		1.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	95,00	95,15	95,30	95,45						
		1.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	96,01	96,02	96,03	96,04						
		1.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	85,80	85,81	85,82	85,83						
		1.6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	3,31	3,32	3,33	3,34						
		02. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan											**Kesekretariatan**
		2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	3,82	3,83	3,84	3,85						

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen dari pimpinan hingga seluruh jajaran dibawahnya dalam bentuk keterlibatan dalam perumusan dan penetapan perencanaan kinerja yang harus dicapai dalam periode Tahun 2025.

Tabel 7. Rencana Kinerja Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50%
		3. Indeks persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan	96%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	96%

C. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025

Pada triwulan IV tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan revisi Perjanjian Kinerja 2025. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan revisi Rencana Strategis 2025-2029 dan revisi Indikator Kinerja Utama. Semula untuk sasaran strategis hanya 2 (dua) berubah menjadi 3 (tiga) sasaran strategis, sedangkan untuk indikator kinerja yang semula 4 (empat) berubah menjadi 12 (dua belas) indikator kinerja.

Tabel 8. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%
		2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%
		3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%
		4. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%
		5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	75%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,3

Jumlah anggaran untuk program kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Rencana Anggaran Kinerja Tahun 2025

No.	PROGRAM ANGGARAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	49.155.514.000
2.	Pengadaan Sarana Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	224.910.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	694.605.000
Total anggaran kegiatan tahun 2025		**50.075.029.000**

(Lima puluh miliar tujuh puluh lima juta dua puluh Sembilan ribu rupiah)

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %
	2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	50 %
	3. Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan.	96 %
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	96 %

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bulan september tahun 2025 dinyatakan "Berhasil", karena pada semua sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100%,

yaitu sebesar 104,07%. Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 104,04%. Indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi capaian sebesar 104,30%. Indikator kinerja Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan capaian sebesar 103,76%. Indikator kinerja Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu capaian sebesar 104,17%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah berhasil mencapai target di semua indikator kinerja.

Tabel 11. Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI S.D. SEPTEMBER	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96 %	99,88%	104,04%
	2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	50 %	52,15%	104,3%
	3. Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan.	96 %	99,61%	103,76%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	96 %	100%	104,17%

E. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada triwulan IV tahun 2025 melakukan revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 dan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 guna menyesuaikan dengan penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029 dan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029. Atas hal tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 12. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
TUJUAN 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan		
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%
	2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.	96%
	3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	96%
	4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan *e-Court*.	96%
	5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan *e- Berpadu.*	75%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,81
TUJUAN 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional		
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan. 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA). 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM). 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA). 5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM). 6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	71,51 96,00 92,15 96,00 84,00 3,30



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis oganisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2025. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengadakan revisi Perjanjian Kinerja 2025 dengan mempertimbangkan perencanaan kriteria dapat dicapai, menantang, realistis dan dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tahun 2025 dinyatakan "Berhasil", karena pada semua sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100%, yaitu sebesar 103,87%. Indikator kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu capaian sebesar 104,17%. Indikator kinerja Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju capaian sebesar 104,17%. Indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan capaian sebesar 104,17%. Indikator kinerja Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court capaian sebesar 104,02%. Indikator kinerja Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu capaian sebesar 105,85%. Indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan capaian sebesar 103,41%. Indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan capaian sebesar 108,01%. Indikator kinerja Nilai Indikator

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA) capaian sebesar 103,86%. Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM) capaian sebesar 103,46%. Indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA) capaian sebesar 104,17%. Indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM) capaian sebesar 101,19%. Sedangkan indikator kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan capaian sebesar 100,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah berhasil mencapai target di semua indikator kinerja untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern, Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik dan Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Tabel 13. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. **Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	100%	104,17
	2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	100%	104,17
	3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,17
	4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	99,86%	104,02
	5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	75%	79,39%	105,85
2. **Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	3,94	103,41
3. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	77,24	108,01
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	99,71	103,86

Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	95,34	103,46
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	100,00	104,17
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	85,00	101,19
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	3,30	100,00
Rata-rata Capaian				**103,87**

Keberhasilan capain ini karena adanya monitoring dan evaluasi, pimpinan selalu melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari dan setiap bulan untuk memastikan pelaksanaan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan berjalan baik sesuai ketentuan, tindaklanjut terhadap temuan-temuan pengawasan bidang, penginputan dalam SIPP diinput 1 x 24 jam, adanya evaluasi implementasi SIPP tahun 2025 secara berkala, manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus prosesnya berlangsung cepat menjamin keadilan dan kepastian hukum, akuntabel dan transparan, dan peningkatan pengetahuan SDM dengan melalui pembinaan maupun mengikuti sosialisasi/bintek.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja pada 3 (tiga) Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat

menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi.

Dari 5 indikator yang diukur pada sasaran ini, dengan rincian target sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu dengan target sebesar 96%
2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju dengan target sebesar 96%
3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dengan target sebesar 96%
4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court dengan target sebesar 96%
5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu dengan target sebesar 75%

Sasaran 1 Indikator 1

Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator kinerja "Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu" adalah perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Perkara

yang diselesaikan tepat waktu dilaksanakan berdasarkan kebijakan dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada tingkat banding paling lambat 3 (tiga) bulan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SPIP.

Tabel 14. Capaian Sasaran 1 Indikator 1

Bulan	Jumlah perkara yang diselesaikan Tahun 2025	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2025	Realisasi Persentase Perkara yang Putus Tepat Waktu
Januari	194	144	74,23%
Februari	241	202	83,82%
Maret	125	118	94,40%
April	120	94	78,33%
Mei	172	105	61,05%
Juni	287	202	70,38%
Juli	277	220	79,42%
Agustus	259	205	79,15%
September	253	227	89,72%
Oktober	235	223	94,89%
November	186	186	100%
Desember	153	153	100%

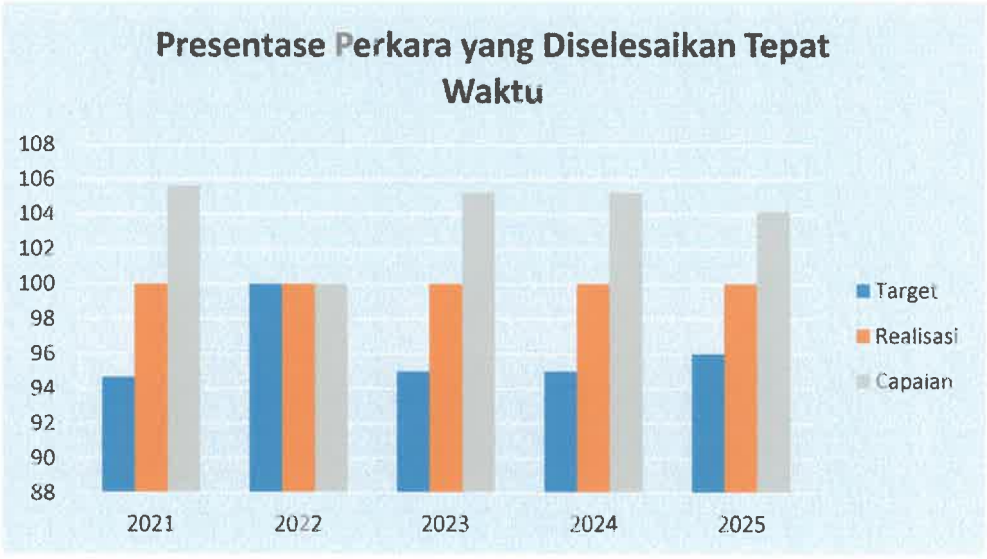
Berdasarkan data pada tabel di atas pada tahun 2025 realisasi indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%. Secara umum realisasi indikator ini baik karena realisasi di atas target yang ditetapkan. Keberhasilan capain ini karena adanya monitoring dan evaluasi, pimpinan selalu melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari dan setiap bulan untuk memastikan pelaksanaan administrasi penanganan perkara berjalan baik sesuai ketentuan,

penginputan dalam SIPP diinput 1 x 24 jam, adanya evaluasi implementasi SIPP tahun 2025 secara berkala, manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus prosesnya berlangsung cepat menjamin keadilan dan kepastian hukum, akuntabel dan transparan, dan peningkatan pengetahuan SDM dengan melalui pembinaan maupun mengikuti sosialisasi/bintek.

Tabel 15. Perbandingan Sasaran 1 Indikator 1

Indikator Kerja	Tahun	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	2021	1288	1288	94,66%	100%	105,64%
	2022	1213	1213	100%	100%	100,00%
	2023	1329	1329	95%	100%	105,26%
	2024	1870	1870	95%	100%	105,26%
	2025	2079	2079	96%	100%	104,17%

Grafik 1. Capaian Sasaran 1 Indikator 1



Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas, persentase penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2025 dengan target 96%, realisasi sebesar 100% dan capaiannya sebesar 104,17%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sampai 2024 realisasi tetap

konsisten terjaga sebesar 100%. Sedangkan dalam jumlah perkara yang menjadi beban di tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Keberhasilan penyelesaian perkara tepat waktu mencapai 100% menunjukkan salah satu keberhasilan tercapaianya sasaran strategis Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Sasaran 1 Indikator 2

Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

Indikator kinerja "Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju" adalah perbandingan Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus. Input merupakan jumlah perkara yang diputus, sedangkan output merupakan jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu. Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan).

Tabel 16. Capaian Sasaran 1 Indikator 2

Bulan	Jumlah perkara yang diputus Tahun 2025	jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu Tahun 2025	Realisasi Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
Januari	144	144	100%
Februari	202	202	100%
Maret	118	118	100%
April	94	94	100%

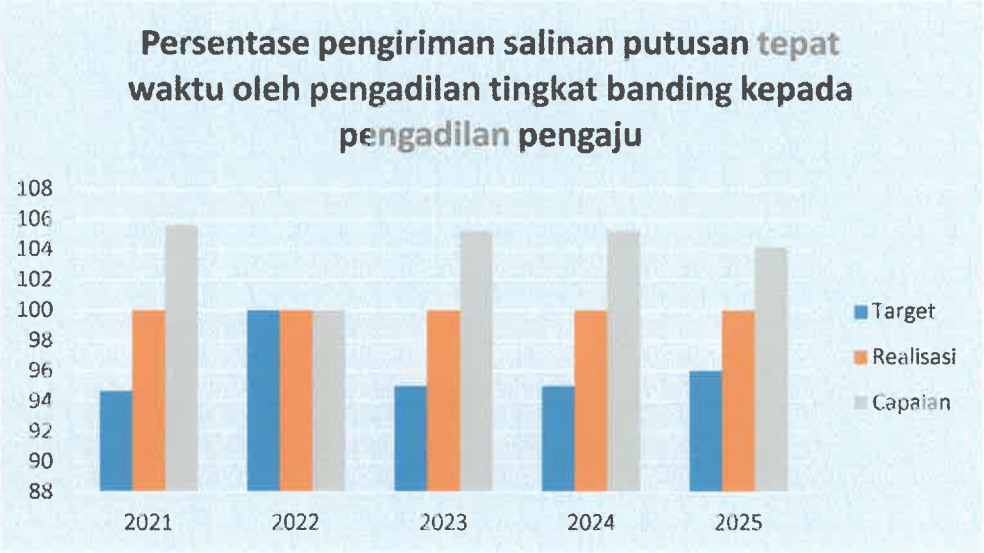
Mei	105	105	100%
Juni	202	202	100%
Juli	220	220	100%
Agustus	205	205	100%
September	227	227	100%
Oktober	223	223	100%
November	186	186	100%
Desember	153	153	100%

Pada tahun 2025, jumlah perkara yang diputus sebanyak 2079 perkara dan sebanyak 2079 putusan perkara dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu. Salinan putusan dikirim ke Pengadilan pengaju paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Pada tahun 2025 indikator ini realisasi 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan efektivitas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam pengiriman putusan perkara. Berikut tabel perbandingan rincian pengiriman salinan putusan perkara ke pengadilan pengaju tepat waktu.

Tabel 17. Perbandingan Sasaran 1 Indikator 2

Indikator Kerja	Tahun	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	2021	1288	1288	94,66%	100%	105,64%
	2022	1213	1213	100%	100%	100,00%
	2023	1329	1329	95%	100%	105,26%
	2024	1870	1870	95%	100%	105,26%
	2025	2079	2079	96%	100%	104,17%

Grafik 2. Capaian Sasaran 1 Indikator 2



Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas, Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju tahun 2025 dengan target 96%, realisasi sebesar 100% dan capaiannya sebesar 104,17%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 sampai 2024 realisasi tetap konsisten terjaga sebesar 100%. Keberhasilan pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju mencapai 100% menunjukkan bahwa proses modernisasi administrasi perkara secara elektronik berjalan dengan lancar, keberhasilan monitoring dan evaluasi secara rutin oleh pimpinan, dukungan sarana dan prasarana, serta adanya kerjasama dengan PT Pos Indonesia.

Sasaran 1 Indikator 3

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator kinerja "Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan" adalah perbandingan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi. Input merupakan jumlah putusan yang telah diminutasi,

sedangkan untuk output adalah Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan. putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, dimana unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.

Tabel 18. Capaian Sasaran 1 Indikator 3

Bulan	Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2025	Jumlah jumlah putusan yang telah diminutasi Tahun 2025	Realisasi Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
Januari	144	144	100%
Februari	202	202	100%
Maret	118	118	100%
April	93	94	98,94%
Mei	106	105	100,95%
Juni	202	202	100%
Juli	218	220	99,09%
Agustus	200	205	97,56%
September	220	227	96,92%
Oktober	223	223	100%
November	187	186	100,54%
Desember	166	153	108,50%

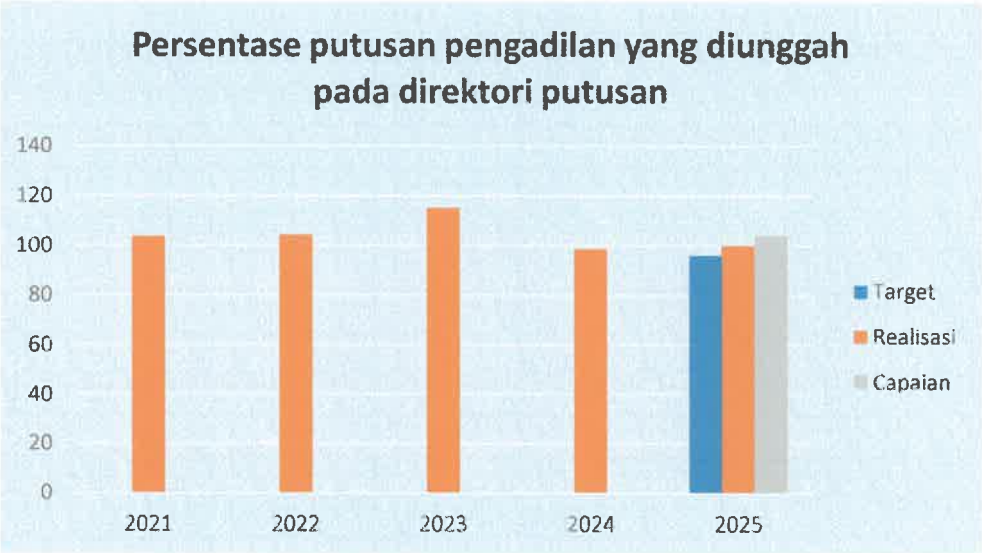
Pada tahun 2025, jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Pengadilan Tinggi Jawa tengah sebanyak 2079 putusan. Unggah putusan pada direktori putusan dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SIPP Tingkat Banding dan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Pada tahun 2025 indikator ini realisasi diatas 100% hal ini merupakan bentuk keberhasilan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mewujudkan peradilan Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern. Berikut tabel

perbandingan rincian putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

Tabel 19. Perbandingan Sasaran 1 Indikator 3

Indikator Kerja	Tahun	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	2021	1288	1336	-	103,73%	-
	2022	1213	1267	-	104,45%	-
	2023	1329	1531	-	115,20%	-
	2024	1870	1844	-	98,61%	-
	2025	2079	2079	96%	100%	104,17%

Grafik 3. Capaian Sasaran 1 Indikator 3



Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas, Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tahun 2025 dengan target 96%, realisasi sebesar 100% dan capaiannya sebesar

104,17%. Pada tahun 2021 sampai 2024 tidak terdapat target sehingga tidak dapat dihitung capaiannya, hal ini dikarenakan indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan baru ditetapkan pada tahun 2025. Keberhasilan capaian putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan menunjukkan bahwa proses modernisasi administrasi perkara secara elektronik berjalan dengan lancar, keberhasilan monitoring dan evaluasi secara rutin oleh pimpinan, dukungan sarana dan prasarana.

Sasaran 1 Indikator 4

Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court

Indikator kinerja "Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court" adalah perbandingan jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e- Court dengan jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan. Input merupakan jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan, sedangkan untuk output adalah Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e- Court. Perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Tabel 20. Capaian Sasaran 1 Indikator 4

Bulan	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court Tahun 2025	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan Tahun 2025	Realisasi Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court
Januari	72	73	98,63%
Februari	50	50	100%
Maret	38	38	100%
April	51	51	100%
Mei	61	61	100%
Juni	101	101	100%
Juli	56	56	100%
Agustus	65	65	100%
September	40	40	100%
Oktober	70	70	100%
November	39	39	100%
Desember	48	48	100%

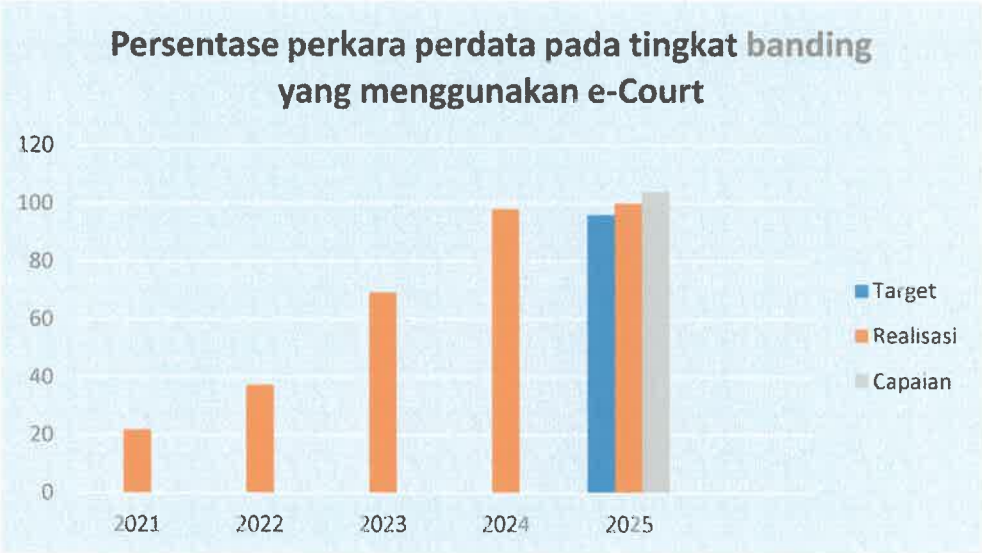
Pada tahun 2025, jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e- Court pada Pengadilan Tinggi Jawa tengah sebanyak 691 perkara. Perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e- Court merupakan perkara yang diajukan secara elektronik dari tingkat pertama melalui aplikasi ecourt yang tersinkronisasi pada aplikasi SIPP tingkat banding. Pada tahun 2025 indikator ini realisasi masih belum bisa tercapai 100%, namun capaian kinerja sebesar 104,02%. Hal ini dikarenakan masih ada permasalahan yang belum bisa diakomodir oleh aplikasi ecourt dan terdapat juga kendala jaringan maupun akses di server aplikasi ecourt. Berikut tabel perbandingan rincian perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e- Court. Meskipun masih terdapat kendala Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dan terus berupaya untuk mewujudkan

Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.

Tabel 21. Perbandingan Sasaran 1 Indikator 4

Indikator Kerja	Tahun	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e- Court	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	2021	572	125	-	21,85%	-
	2022	517	193	-	37,33%	-
	2023	520	360	-	69,23%	-
	2024	631	618	-	97,94%	-
	2025	692	691	96%	99,86%	104,02%

Grafik 4. Capaian Sasaran 1 Indikator 4



Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas, Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court tahun 2025 dengan target 96%, realisasi sebesar 99,86% dan capaiannya

sebesar 104,02%. Pada tahun 2021 sampai 2024 tidak terdapat target namun terdapat realisasi sehingga tidak dapat dihitung capaiannya, hal ini dikarenakan indikator Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court baru ditetapkan pada tahun 2025. Penggunaan aplikasi e-Court sudah mulai diterapkan pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Keberhasilan proses modernisasi administrasi perkara secara elektronik menunjukkan salah satu keberhasilan tercapaianya sasaran strategis Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Sasaran 1 Indikator 5

Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu

Indikator kinerja "Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu" adalah perbandingan jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu dengan jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan. Input merupakan jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan, sedangkan untuk output adalah Jumlah perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu. Perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Tabel 22. Capaian Sasaran 1 Indikator 5

Bulan	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu Tahun 2025	Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan Tahun 2025	Realisasi Persentase perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu
Januari	0	107	0%
Februari	5	141	3,55%
Maret	20	48	41,67%
April	56	62	90,32%
Mei	83	85	97,65%
Juni	117	119	98,32%
Juli	135	136	99,26%
Agustus	136	137	99,27%
September	159	159	100%
Oktober	139	139	100%
November	135	135	100%
Desember	105	105	100%

Pada tahun 2025, jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu pada Pengadilan Tinggi Jawa tengah sebanyak 1090 perkara. Perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu merupakan perkara yang diajukan secara elektronik dari tingkat pertama melalui aplikasi e-berpadu yang tersinkronisasi pada aplikasi SIPP tingkat banding. Pada tahun 2025 indikator ini realisasi masih belum bisa tercapai 100% yang disebabkan penggunaan aplikasi e-Berpadu baru diwajibkan pada bulan april tahun 2025 bertepatan dengan adanya pembaruan versi aplikasi SIPP Tingkat Pertama dan aplikasi e-Berpadu. Secara umum realisasi indikator ini baik karena realisasi sampai akhir tahun diatas target yang ditetapkan. Keberhasilan capain ini karena adanya monitoring dan evaluasi, pimpinan selalu melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari dan setiap bulan untuk memastikan pelaksanaan

administrasi penanganan perkara berjalan baik sesuai ketentuan, adanya evaluasi implementasi SIPP tahun 2025 secara berkala, manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus prosesnya berlangsung cepat menjamin keadilan dan kepastian hukum, akuntabel dan transparan, dan peningkatan pengetahuan SDM dengan melalui pembinaan maupun mengikuti sosialisasi/bintek.

Tabel 23. Perbandingan Sasaran 1 Indikator 5

Indikator Kerja	Tahun	Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan	Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e- Berpadu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	2021	733	-	-	-	-
	2022	708	-	-	-	-
	2023	912	-	-	-	-
	2024	1167	-	-	-	-
	2025	1373	1090	75%	79,39%	105,85%

Grafik 5. Capaian Sasaran 1 Indikator 5



Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas, Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu tahun 2025 dengan target 75%, realisasi sebesar 79,39% dan capaiannya sebesar 105,85%. Pada tahun 2021 sampai 2024 tidak terdapat

target sehingga tidak dapat dihitung capaiannya, hal ini dikarenakan indikator Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu baru ditetapkan pada tahun 2025. Sedangkan penggunaan fitur permohonan upaya hukum banding pada aplikasi e-Berpadu mulai diterapkan pada bulan april tahun 2025 berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 121/SEK/TI1.1.1/I/2025 tentang Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 5.6.5, Aplikasi SIPP Tingkat Banding versi 5.0.0, dan Aplikasi e-Berpadu versi 4.0.0.

Capaian kinerja yang dicapai merupakan cermin keberhasilan proses modernisasi administrasi perkara secara elektronik serta menunjukkan salah satu keberhasilan tercapainya sasaran strategis Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Sasaran Strategis 2

MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai- nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu

ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat.

Secara rinci, Indikator indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan.

Sasaran 2 Indikator 1

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator kinerja "Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan" adalah mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Pengukuran indikator ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ddan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tabel 24. Capaian Sasaran 2 Indikator 1

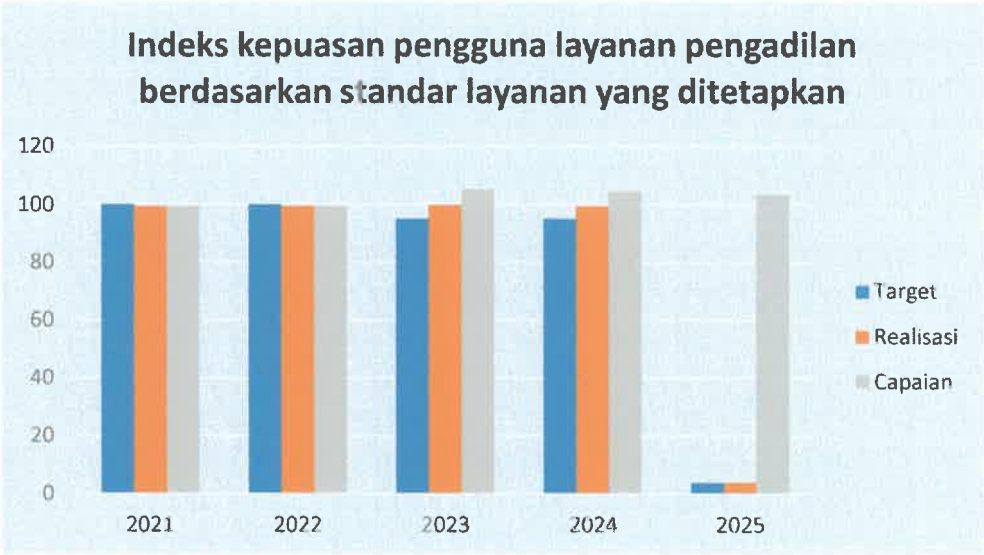
Triwulan Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
I	3,81	3,95	103,67%	Sangat baik
II	3,81	3,84	100,79%	Sangat Baik
III	3,81	3,98	104,46%	Sangat Baik
IV	3,81	3,97	104,20%	Sangat Baik
RATA-RATA	3,81	3,94	103,41%	Sangat Baik

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada tahun 2025 memperoleh rata-rata realisasi sebesar 3,94 sedangkan capaian sebesar 103,41% dari target sebesar 3,81. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Capaian indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 25. Perbandingan Sasaran 2 Indikator 1

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2021	100%	99,32%	99,32%	Sangat Baik
2022	100%	99,43%	99,43%	Sangat Baik
2023	95%	99,77%	105,26%	Sangat Baik
2024	95%	99,34%	104,57%	Sangat Baik
2025	3,81	3,94	103,41%	Sangat Baik

Grafik 6. Capaian Sasaran 2 Indikator 1



Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas, Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan tahun 2025 dengan target 3,81, realisasi sebesar 3,94 dan capaiannya sebesar 103,41%. Nilai realiasasi indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2025 menggunakan nilai indeks skala 4, sedangkan untuk nilai indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2021 sampai tahun 2024 menggunakan nilai indeks skala 100. Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan

Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yaitu SISUPER. Faktor yang mendukung capaian tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) PTSP yang melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan, melalui Briefing, Bimtek, Training Service Excellent, sosialisasi, Pelatihan Pelayanan Disabilitas;
2. Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas. Pada tahun 2025 melaksanakan perbaikan jalur *guidingblock* ruang PTSP, menambah sarana pendukung dan menyiapkan SDM yang khusus bertugas di PTSP.
3. Secara rutin mingguan melaksanakan kegiatan apel PTSP dan pembinaan PTSP oleh pengawas bidang PTSP beserta pejabat struktural.
4. Maklumat pelayanan yang telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur peradilan.
5. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan atau SOP;
6. Monitoring dan evaluasi pelayanan PTSP yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti.

Sedangkan faktor-faktor kendala dalam pencapaian kinerja indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan tindak lanjutnya adalah:

1. Kemudahan prosedur pelayanan pada pengadilan, tindaklanjutnya melalui optimalisasi penyampaian informasi prosedur pelayanan pada meja layanan dan media informasi digital.
2. Kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada pengadilan, tindklanjutnya dilakukan peninjauan kembali pada persyaratan pelayanan agar benar-benar sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Serta

dilakukan penguatan sosialisasi kepada petugas pelayanan agar memberikan penjelasan yang jelas dan konsisten kepada masyarakat mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga meminimalkan kebingungan dan persepsi ketidaksesuaian persyaratan.

3. Kecepatan waktu pengadilan dalam memberikan pelayanan, tindaklanjutnya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap waktu penyelesaian layanan untuk memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (good governance). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Sasaran 3 Indikator 1

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator kinerja "Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan" adalah mengukur secara sistematis profesionalisme ASN, dengan hasil yang berkategori (sangat tinggi hingga sangat rendah). Ukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) berdasarkan empat dimensi: Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja (SKP), dan Disiplin (Hukuman Disiplin) berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 38 Tahun 2018 dan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019.

Realisasi Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 sesuai dengan data pada aplikasi SIKEP diperoleh realisasi sebesar 77,24. Capaian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkategori sedang, hal ini disebabkan beberapa hakim dan pegawai pada komponen disiplin dan kompetensi memiliki nilai yang masih rendah. Atas hal tersebut, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan mendorong para hakim dan pegawai yang masih bernilai rendah untuk dapat meningkatkan kompetensi dengan mengusulkan untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan agar terpenuhi standar kompetensi menuju ASN yang profesional.

Tabel 26. Perbandingan Sasaran 3 Indikator 1

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	71,51	77,24	108,01%	Sedang

Berdasarkan data pada tabel di atas, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025 dengan target 71,51 dengan realisasi sebesar 77,24 dan capaiannya sebesar 108,01%. Pada tahun 2021 sampai 2024 tidak terdapat target dan realisasi sehingga tidak dapat dihitung capaiannya, hal ini dikarenakan indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan baru ditetapkan pada tahun 2025.

Meskipun capaian kinerja yang dicapai diatas 100%, realisasi masih dikategori sedang, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan terus mendorong peningkatan standar profesionalitas setiap pegawai agar terwujud Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional.

Sasaran 3 Indikator 2

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)

Indikator kinerja "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)" adalah Nilai yang mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran satuan kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah DIPA 01 Badan Urusan Adminstrasi, diukur dari 8 indikator utama seperti penyerapan, belanja kontraktual, dan capaian output, yang mencakup aspek kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil anggaran, dengan nilai tinggi menunjukkan kinerja baik. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA) berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai ini dihitung menggunakan rumus dari Kementerian Keuangan dan berfungsi untuk evaluasi, mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik, bukan hanya sekadar angka.

Tabel 27. Capaian Sasaran 3 Indikator 2

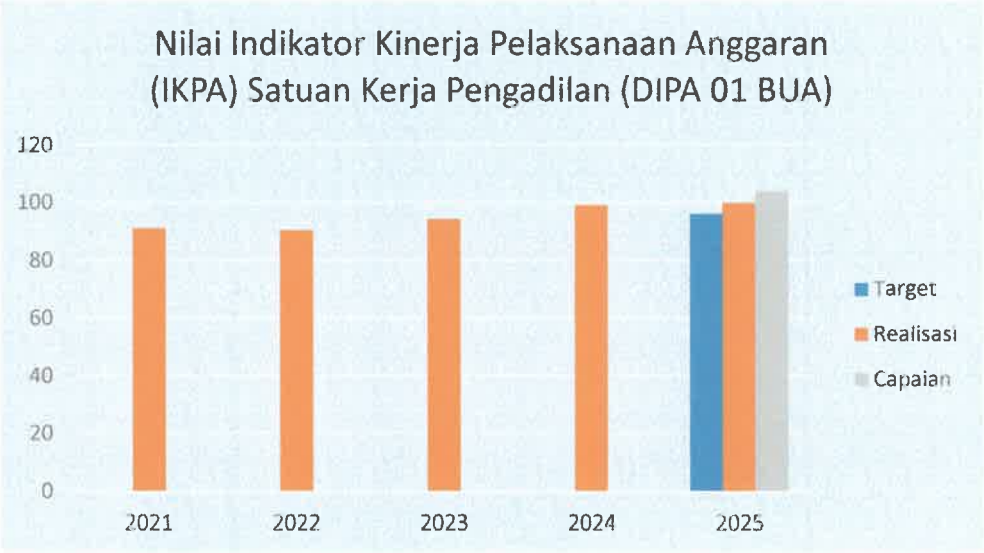
BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Januari	96	100	104,17%
Februari	96	100	104,17%
Maret	96	100	104,17%
April	96	100	104,17%
Mei	96	99,99	104,16%
Juni	96	99,97	104,14%
Juli	96	99,87	104,03%
Agustus	96	99,94	104,10%
September	96	99,91	104,07%
Oktober	96	99,14	103,27%
November	96	98,97	103,09%
Desember	96	98,71	102,82%

Pada tahun 2025, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA) mengalami tren penurunan nilai, hal ini efek dari beberapa akun yang mengalami pemblokiran terkait dengan kebijakan pemerintah. Beberapa rencana kerja mengalami penyesuaian, seperti pengawasan daerah, kegiatan bimtek, jadwal pemeliharaan aset. Meskipun dengan beberapa kendala yang ada, realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masih dalam kategori sangat baik dengan nilai diatas 95.

Tabel 28. Perbandingan Sasaran 3 Indikator 2

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2021	-	91,10	-	Baik
2022	-	90,39	-	Baik
2023	-	94,19	-	Baik
2024	-	99,01	-	Sangat Baik
2025	96	99,71	103,86%	Sangat Baik

Grafik 7. Capaian Sasaran 3 Indikator 2



Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA) tahun 2025 dengan target 96 dengan realisasi sebesar 99,71 dan capaiannya sebesar 103,86%. Pada tahun 2021 sampai 2024 tidak terdapat target namun terdapat realisasi sehingga nilai capaiannya N/A (tidak ada nilai), hal ini dikarenakan indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA) baru ditetapkan pada tahun 2025.

Sasaran 3 Indikator 3

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)

Indikator kinerja "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)" adalah Nilai yang mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran satuan kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah DIPA 03 Badan Peradilan Umum, diukur dari 8 indikator utama seperti penyerapan, belanja kontraktual, dan capaian output, yang mencakup aspek kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil anggaran, dengan nilai tinggi menunjukkan kinerja baik. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM) berdasarkan Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Nilai ini dihitung menggunakan rumus dari Kementerian Keuangan dan berfungsi untuk evaluasi, mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik, bukan hanya sekadar angka.

Tabel 29. Capaian Sasaran 3 Indikator 3

BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Januari	92,15	100	108,52%
Februari	92,15	100	108,52%
Maret	92,15	100	108,52%
April	92,15	94,15	102,17%
Mei	92,15	93,74	101,73%
Juni	92,15	94,76	102,83%
Juli	92,15	93,29	101,24%
Agustus	92,15	92,92	100,84%
September	92,15	94,66	102,72%
Oktober	92,15	93,98	101,99%
November	92,15	93,26	101,20%
Desember	92,15	93,27	101,22%

Pada tahun 2025, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM) rata-rata sebesar 95,34. Dengan diberlakukannya aplikasi e-Berpadu secara penuh untuk proses perkara pidana, sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan DIPA 03 Badilum. Proses penyelesaian perkara yang dilakukan secara elektronik sangat berpengaruh pada realisasi DIPA yang mana beberapa akun berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian perkara, terutama kegiatan surat menyurat seperti pengiriman penahanan dan perpanjangan penahanan, pengiriman

salinan dan petikan putusan, dan pengiriman berkas perkara. Meskipun dengan beberapa kendala yang ada, capaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masih diatas 100%.

Tabel 30. Perbandingan Sasaran 3 Indikator 3

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2021	-	93,13	-	Baik
2022	-	83,80	-	Cukup
2023	-	81,33	-	Cukup
2024	-	97,15	-	Sangat Baik
2025	92,15	95,34	103,46%	Sangat Baik

Grafik 8. Capaian Sasaran 3 Indikator 3



Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM) tahun 2025 dengan target 92,15 dengan realisasi sebesar 95,34 dan capaiannya sebesar 103,46%. Pada tahun 2021 sampai 2024 tidak terdapat target namun terdapat realisasi sehingga nilai

capaiannya N/A (tidak ada nilai), hal ini dikarenakan indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM) baru ditetapkan pada tahun 2025.

Sasaran 3 Indikator 4

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)

Indikator kinerja "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)" adalah tolok ukur kualitas perencanaan anggaran satuan kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, diukur melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh Kementerian Keuangan, yang mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan, seperti ketepatan waktu revisi, penyelesaian tagihan, capaian output, dan konsistensi penyerapan. Nilai ini menentukan kualitas pengelolaan anggaran, mendorong efisiensi, dan memastikan anggaran memberikan manfaat optimal. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA) terdiri dari, Efektifitas (75%) berupa agregasi Capaian RO Satker dan Efisiensi (25%) yaitu agregasi nilai efisiensi satker.

Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA) pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 100. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran DIPA (01) BUA pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memenuhi kriteria efektif dan efisien. Adanya keseimbangan dan koordinasi yang baik antar sub bagian, serta monitoring dan evaluasi dari pimpinan yang dilakukan secara berkala, sehingga membuat kinerja perencanaan yang berkualitas, efektif dan efisien dapat dicapai.

Tabel 31. Perbandingan Sasaran 3 Indikator 4

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	94,60	-	Baik
2025	96	100	104,17%	Sangat Baik

Berdasarkan data pada tabel di atas, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA) tahun 2025 dengan target 96 dengan realisasi sebesar 100 dan capaiannya sebesar 104,17%. Pada tahun 2021 sampai 2023 tidak terdapat target dan realisasi sehingga tidak dapat dihitung capaiannya. Sedangkan untuk tahun 2024 terdapat realisasi namun tidak terdapat target dan capaian kinerja benilai N/A (tidak ada nilai), hal ini dikarenakan indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA) baru ditetapkan pada tahun 2025.

Keberhasilan indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA) sebesar 100% menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mampu menyusun perencanaan anggaran yang berkualitas, efisien dan memberikan manfaat optimal.

Sasaran 3 Indikator 5

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)

Indikator kinerja "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)" adalah tolok ukur kualitas perencanaan anggaran satuan kerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah DIPA 03 Badan Peradilan Umum, diukur melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) oleh Kementerian Keuangan, yang mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan, seperti ketepatan waktu revisi, penyelesaian tagihan, capaian output, dan konsistensi penyerapan. Nilai ini

menentukan kualitas pengelolaan anggaran, mendorong efisiensi, dan memastikan anggaran memberikan manfaat optimal. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM) terdiri dari, Efektifitas (75%) berupa agregasi Capaian RO Satker dan Efisiensi (25%) yaitu agregasi nilai efisiensi satker.

Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM) pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 85. Sesuai dengan data yang diperoleh melalui aplikasi Smartmonev Kemenkeu, bahwa nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (03) BADILUM pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk kriteria efektif sudah maksimal. Sedangkan pada kriteria efisien masih rendah, sehingga diperlukan perbaikan dalam perencanaan yang terarah, terukur, dan konsisten.

Tabel 32. Perbandingan Sasaran 3 Indikator 5

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	88,89	-	Cukup
2025	84	85	101,19%	Cukup

Berdasarkan data pada tabel di atas, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM) tahun 2025 dengan target 84 dengan realisasi sebesar 85 dan capaiannya sebesar 101,19%. Pada tahun 2021 sampai 2023 tidak terdapat target dan realisasi sehingga tidak dapat dihitung capaiannya. Sedangkan untuk tahun 2024 terdapat realisasi namun tidak terdapat target dan capaian kinerja benilai N/A (tidak ada nilai), hal ini dikarenakan indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM) baru ditetapkan pada tahun 2025.

Realisasi indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM) sebesar 85 atau berkategori cukup, hal ini berkaitan dengan target output berupa perkara yang merupakan produk hukum. Jumlah perkara yang bersifat dinamis (berubah-ubah) mempersulit menentukan target perencanaan yang optimal. Diperlukan proses strategis untuk menetapkan target, metode perhitungan, dan waktu penyelesaian perkara (seperti jumlah putusan atau berkas yang diselesaikan) guna mengukur kinerja satuan kerja, sehingga Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat mencapai harapan perencanaan anggaran yang berkualitas, efisien dan memberikan manfaat optimal.

Sasaran 3 Indikator 6

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator kinerja "Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan" adalah nilai untuk mengukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sehingga tata kelola BMN yang lebih tertib, akuntabel, dan produktif (Distinguished Asset Manager). IPA menilai empat sasaran strategis yaitu akuntabilitas/produktivitas, kepatuhan hukum, pengawasan/pengendalian, dan administrasi, yang juga berfungsi sebagai evaluasi reformasi birokrasi.

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Realisasi Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 3,3. Keberhasilan capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah sesuai dengan target yang

sudah ditetapkan. Adanya monitoring dan evaluasi dari pimpinan yang dilakukan secara berkala, diharapkan dapat meningkatkan kinerja di tahun mendatang, serta dapat mencapai tata kelola BMN yang lebih tertib, akuntabel, dan produktif.

Tabel 33. Perbandingan Sasaran 3 Indikator 6

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	3,3	3,3	100%	Baik

Berdasarkan data pada tabel di atas, Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025 dengan target 3,3 dengan realisasi sebesar 3,3 dan capaiannya sebesar 100%. Pada tahun 2021 sampai 2024 tidak terdapat target dan realisasi sehingga tidak dapat dihitung capaiannya, hal ini dikarenakan indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan baru ditetapkan pada tahun 2025.

Realisasi indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan sebesar 3,3 atau berkategori baik. Keberhasilan capaian kinerja indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan sebesar 100% menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam melakukan tata kelola BMN sudah lebih tertib, akuntabel, dan produktif.

3. Membandingkan Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang ada dalam dokumen perencanaan strategis sebagai berikut :

Tabel 34. Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH									
Program /kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Utama	Target Jangka Menengah					Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
			2025	2026	2027	2028	2029		
Program Penegakan dan Palayanan Hukum	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	96%	97%	97%	97%	100%	104,17%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	96%	97%	97%	97%	100%	104,17%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	96%	96%	96%	96%	100%	104,17%
		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	96%	97%	97%	97%	99,86%	104,02%
		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	75%	96%	96%	96%	96%	79,39%	105,85%
	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	3,82	3,83	3,84	3,85	3,94	103,41%
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	71,52	71,53	71,54	71,55	77,24	108,01%

PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH									
Program /kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Utama	Target Jangka Menengah					Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
			2025	2026	2027	2028	2029		
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	96,15	96,30	96,45	96,60	99,71	103,86%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	95,00	95,15	95,30	95,45	95,34	103,46%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	96,01	96,02	96,03	96,04	100	104,17%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	85,80	85,81	85,82	85,83	85	101,19%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	3,31	3,32	3,33	3,34	3,30	100%

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dinyatakan berhasil karena semua target indikator kinerja realisasinya tercapai dan capainnya untuk tiap – tiap indikator kinerja lebih dari 100%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Pengadilan Tinggi Lainnya.

Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tahun 2025 dengan Pengadilan Tinggi Lainnya sebagai berikut:

Tabel 35. Perbandingan Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 dengan Pengadilan Tinggi Lainnya

Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah			Pengadilan Tinggi Lainnya (Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025)			Rata-Rata Capain Kinerja Nasional (PT Seluruh Indonesia)		
		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transperan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	100	104,17	100%	100	100,00	96%	100	103
	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	100	104,17	100%	100	100,00	100%	100	100
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100	104,17	90,11%	100	110,98	90%	100	111
	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	99,86	104,02	97,25%	98,96	101,76	96%	99	103
	Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	79,39	105,85	89,8%	92,54	103,05	90%	73	81
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	3,94	103,41	3,8	3,99	105,00	3,78	3,90	103

Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah			Pengadilan Tinggi Lainnya (Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2025)			Rata-Rata Capain Kinerja Nasional (PT Seluruh Indonesia)		
		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	77,24	108,01	80	82,45	103,06	71,00	81,62	115
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	99,71	103,86	93	93,2	100,22	93,00	97,71	105
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	95,34	103,46	93	86,42	92,92	93,00	93,43	100
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	100	104,17	75	93,3	124,40	75,00	97,44	130
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	85	101,19	75	95,82	127,76	75,00	86,96	116
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	3,30	100	3	3,18	106,00	3,00	3,37	112
Rata – rata Capaian				**103,87**			**104,22**			**107**

Berdasarkan tabel diatas, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah rata-rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar **103,87%**, dibandingkan dengan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung sebesar **104,22%** dan rata-rata capaian kinerja

nasional pada 34 (tiga puluh empat) Pengadilan Tinggi di Lingkungan Badan Peradilan Umum sebesar **107%**. Perbedaan ini disebabkan:

1. Target Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tahun 2025, dari 12 (dua belas) target indikator kinerja terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang targetnya lebih tinggi dari Pengadilan Tinggi Bandung dan rata-rata target nasional. Indikator tersebut antara lain:
   - Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
   - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
   - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA).
   - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA).
   - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM).
   - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.
2. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tahun 2025, dari 12 (dua belas) target indikator kinerja terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang capaiannya lebih tinggi dari Pengadilan Tinggi Bandung dan rata-rata target nasional. Indikator tersebut antara lain:
   - Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
   - Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.
   - Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.
   - Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu.
   - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM).

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum target Pengadilan Tinggi Jawa Tengah lebih tinggi dari target Pengadilan Tinggi Bandung dan rata-rata target nasional. Sedangkan untuk capaian kinerja Pengadilan Tinggi

Jawa Tengah meskipun lebih rendah namun semua indikator tercapai diatas 100% dan tidak terdapat anomali.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja /Kendala

Beberapa keberhasilan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di tahun 2025 sebagai berikut:

a) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat mempertahankan predikat WBK dan WBBM menunjukan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak berhenti.

Gambar 11. Piagam Penghargaan Kemenpan RB


PIAGAM PENGHARGAAN

HAKORDIA 2020

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

Pengadilan Tinggi Semarang

atas partisipasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Jakarta, 21 Desember 2020

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo

b) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat Sertifikat AMPUH (Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh) dengan predikat Unggul diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI.

Gambar 12. Perolehan Sertifikat AMPUH dengan Predikat Unggul


SERTIFIKAT

NOMOR 1692/DJU/SK.OTI.6/XII/2025

Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025

menyatakan bahwa:

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

telah memenuhi standar AMPUH dengan predikat:

UNGGUL

Penilaian Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) akan dilakukan kembali setiap 1 (satu) tahun

Jakarta, 5 Desember 2025
Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Mirante

c) Tahun 2025 Penghargaan Penilaian Layanan Pengadilan (PTSP) Terbaik I Tingkat Pengadilan Tinggi se-Indonesia

Gambar 13. Penghargaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



d) Tahun 2025 Penghargaan Hakim Tinggi Pengawas Daerah (HATIWASDA) Sekaligus Asesor Terbaik.

Gambar14. HATIWASDA Sekaligus Asesor Terbaik



e) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat piagam penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Semarang II sebagai Satuan Kerja Terbaik dalam Capaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA (Capaian 100)

Gambar 15. Piagam Penghargaan dari KPPN Semarang II


KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN SEMARANG II

PIAGAM PENGHARGAAN

KEP-94/KPN.1402/2025

Diberikan kepada

PENGADILAN TINGGI SEMARANG
(097713)

sebagai

Satuan Kerja Terbaik dalam Capaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA
(Capaian 100)

Semarang, 25 Agustus 2025

Sidiq Juniarso
Kepala KPPN Semarang II

f) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat piagam penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagai Unit Terbaik Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2024 Kategori Jumlah Satker Lebih dari 49

Gambar 16. Piagam Penghargaan dari Kanwil DJPB Jawa Tengah


KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: KEP-115/WPB.14/2025

DIBERIKAN KEPADA

PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Sebagai Unit Terbaik Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2024
Kategori Jumlah Satker Lebih dari 49
Jaga Akuntabilitas Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Semarang, 19 Agustus 2025
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah

BAYU ANDY PRASETYA

g) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat piagam penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagai Unit Dengan Kinerja Sangat Baik Dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2025

Gambar 17. Piagam Penghargaan dari Kanwil DJPB Jawa Tengah



h) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat piagam penghargaan dari Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Peringkat 2 untuk kategori transaksi BMN di atas 40 satuan kerja Tahun 2025

Gambar 18. Piagam Penghargaan dari Biro Perlengkapan MA RI



i) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat piagam penghargaan dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Peringkat III koordinator wilayah DIPA 005.01 terbaik kategori satuan kerja besar (jumlah satuan kerja lebih dari 40) berdasarkan data laporan keuangan Tahun 2025

Gambar 19. Piagam Penghargaan dari Sekretaris MA RI


SERTIFIKAT
PENGHARGAAN
Diberikan kepada:
KOORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH
Pengadilan Tinggi Semarang
Peringkat III
Koordinator Wilayah DIPA 005.01 Terbaik Kategori Satuan Kerja Besar
(jumlah Satuan Kerja Lebih Dari 40)
berdasarkan data Laporan Keuangan Tahun 2025
Sekretaris
Mahkamah Agung RI
SUGIYANTO, S.H., M.H.

Analisa penyebab keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut di atas didukung oleh beberapa faktor yaitu:

3. Komitmen dari pimpinan dan segenap aparatur pengadilan, menyatakan ikrar / komitmen bersama dan menandatangani pakta integritas yang dilaksanakan pada awal bulan Januari 2025.
4. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terdapat kebijakan dalam menegakan disiplin pegawainya dengan memberikan sanksi atau hukuman disiplin bagi aparatur peradilan yang melanggar disiplin pegawai.
5. Secara rutin mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang. Masing-masing bagian menyampaikan laporan kegiatan bulanan dan hakim pengawas bidang melaporkan hasil pengawasn bidang kepada pimpinan untuk dievaluasi di rapat dinas bulanan.

6. Pimpinan Pengadilan secara rutin harian dan bulanan melakukan evaluasi implementasi SIPP.
7. Monev kinerja dilakukan secara rutin sehingga ketika ada capaian kinerja yang anomali langsung diadakan reviu target / reviu perjanjian kinerja tahun 2025.
8. Menindaklanjuti hasil evaluasi dari internal pengawas bidang maupun eksternal dari Badan Pengawasan MA, BPK, dan BUA MA.
9. Melaksanakan inovasi - inovasi yang sangat membantu dan menunjang dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Sedangkan beberapa hal yang sering menjadi kendala kinerja di internal Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam fungsi pengawasan, yaitu keterbatasan kualitas, kuantitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran untuk pengawasan daerah yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) Pengadilan Negeri, alternatif solusi pengawasan menggunakan aplikasi maupun secara daring (zoom).
2. Kompetensi atau kemampuan petugas dalam pelayanan dan aparatur peradilan perlu ditingkatkan. Tindak lanjutnya semua persyaratan dari berbagai jenis layanan yang ada di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan kebijakan-kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung telah disosialisasikan dan mengadakan bimtek/pelatihan, serta mengadakan pembinaan oleh pimpinan.

6. Analisis Atas Efisiensi dalam Penggunaan Sumber Daya.

Beberapa keberhasilan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di tahun 2025 sebagai berikut:

a) Pengawasan Daerah selain dilakukan langsung ke Pengadilan Negeri dapat dilakukan secara daring melalui Aplikasi SIWAREG.

Pembinaan Pimpinan dan Pengawasan Daerah selain dilakukan langsung ke PN dapat dilakukan secara daring. Efisiensi yang dihasilkan dari segi anggaran pengawasan dan waktu

b) Efektivitas penggunaan sumber daya melalui Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)

   Efektivitas penggunaan sumber daya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mengintegrasikan proses layanan yang ada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di dalam satu Lokasi dan mengurangi waktu layanan.

c) Adanya Inovasi Kembang Desa yaitu Layanan informasi berbasis web yang memberikan kemudahan akses informasi terhadap layanan-layanan yang ada di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

d) Penyelesaian perkara dapat diselesaikan tepat waktu dengan jumlah SDM yang terbatas. Efisiensi yang dihasilkan dari sisi anggaran, waktu, kinerja dan meningkatkan pelayanan publik.

e) Biaya Pengawasan Daerah dapat diminimalisir dengan Aplikasi SIWAREG. Efisiensi yang dihasilkan dari segi anggaran pengawasan dan waktu.

f) Komunikasi dan Koordinasi dengan Pengadilan Negeri se Jawa Tengah dilakukan secara daring. Efisiensi yang dihasilkan dari segi anggaran pembinaan, sumber daya, dan waktu lebih efektif.

g) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan rutin terjadwal yang sangat efektif membantu dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya yang ada.

h) Inovasi - inovasi lainnya adalah Silaper, Sicoper, Guardian Asset dan PTSP+ yang ada di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang sangat membantu dan menunjang dalam efektifitas sumber daya untuk peningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan – kegiatan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang

menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selama tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

Tabel 36. Kegiatan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

1. **Pelayanan di PTSP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah**.  PTSP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai upaya nyata untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Dengan adanya PTSP kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan khususnya di capaian kinerja indikator indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	2. **Kegiatan Apel Pagi, Apel Sore dan Apel Petugas PTSP**.   Kegiatan apel pagi, apel sore, dan apel petugas PTSP yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai sarana bagi pimpinan atau atasan untuk memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, dan menyampaikan informasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Dengan adanya kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja semua indikator kinerja.

3. **Sidang Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.**



Tugas Pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Dengan adanya kegiatan sidang perkara banding sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja penyelesaian perkara khususnya di capaian kinerja indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu, persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju dan persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

4. **Public Campaign Anti Gratifikasi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah**



Kegiatan public campaign yang dilakukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai wujud sosialisasi kepada masyarakat bahwa pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bisa diperoleh dengan mudah dan bebas dari praktek KKN, gratifikasi, suap dan pungli. Dengan kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan khususnya di capaian kinerja indikator indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

5. **5S dan 5R diterapkan pada setiap pegawai dan ruangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.**



6. **Penandatanganan Pakta Integritas dan Ikrar Bersama seluruh Hakim dan Pegawai.**



Menegaskan komitmen bersama dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-

Pelaksanaan budaya kerja 5R (Ringkas,Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) dan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun) di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dilaksankan oleh seluruh hakim dan pegawai. Dengan menerapkan dan melaksanakan 5R dan 5S khususnya kepada masyarakat dan sesama pegawai sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja terutama di capaian kinerja indikator indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dan capaian kinerja indikator nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja semua indikator kinerja.

7. **Bimbingan Teknis untuk Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan**.



Bimbingan Teknis (Bintek) dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga teknis untuk hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan. Bintek juga sebagai sarana dalam mensosialisasikan program-program Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan. Dengan adanya kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan SDM dalam meningkatkan capaian kinerja semua indikator kinerja khususnya indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.

8. **Kegiatan Keagamanan di Kantor**



Ditengah kesibukan kerja, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyadari pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan kinerja, tidak hanya dari sisi profesional tetapi juga dalam aspek pribadi dan spiritual. Dengan mengadaakan kegiatan keagamaan yang dapat mempererat hubungan antar pegawai, meningkatkan moral dan menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan sekaligus dapat meningkatkan kinerja di semua indikator kinerja.

9. **Penggunaan Aplikasi untuk peningkatan kinerja.**  Penggunaan aplikasi atau TI sebagai sarana memanfaatkan teknologi khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik dan sebagai sarana penunjang dalam melaksanakan tugas-tugas di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Dengan adanya aplikasi dan TI sangat mendorong terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, dan responsif, Dengan adanya aplikasi TI sangat menunjang keberhasilan SDM dalam meningkatkan capaian kinerja semua indikator kinerja.	10. **Monitoring dan Evaluasi Kinerja**  Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi kinerja (Monev kinerja) kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja, evaluasi capaian kinerja, mengetahui kemajuan serta hambatan atau hal- hal yang yang dapat menghambat jalannya program dan menentukan langkah-langkah perbaikan kedepannya. Dengan adanya kegiatan monev kinerja sangat menunjang keberhasilan dalam meningkatkan capaian kinerja semua indikator kinerja.
11. Kegiatan Refleksi Kinerja Akhir Tahun  Laporan Refleksi Kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas. Dalam Laporan Refleksi Kinerja Tahun 2025 disampaikan	12. Bimbingan Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (e-Court/SIPP).  Melaksanakan acara Bimbingan Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (E-

capaian kinerja yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selama tahun 2025, pencapaian kinerja tahun 2025, serta proyeksi kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2026. Dengan adanya kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan dalam meningkatkan capaian kinerja semua indikator kinerja.	Court / SIPP), sehingga menunjang dalam meningkatkan capaian kinerja khususnya indikator persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.

Sedangkan beberapa kendala atau kegagalan dalam melaksanakan pencapaian kinerja serta langkah-langkah dalam mengatasi kendala sebagai berikut:

a. Kurangnya dukungan anggaran atau DIPA dalam melaksanakan pencapaian kinerja. Langkah-langkah dalam mengatasi masalah kurangnya dukungan anggaran antara lain dengan efisiensi anggaran, apabila memungkinkan menggunakan revisi DIPA dan pengajuan ABT. Kegiatan yang bisa diefisienkan misalkan pembinaan Pimpinan dan Pengawas Daerah selain dilakukan langsung ke PN juga dapat dilakukan secara daring atau menggunakan aplikasi.
b. Dampak risiko atas semua aktifitas kegiatan yang dilaksanakan. Langkah untuk mengatasinya dengan menerapkan manajemen risiko dengan tujuan untuk meminimalkan dampak risiko dan cara mengatasi risiko yang mungkin terjadi.
c. Kebijakan Mahkamah Agung yang belum tersosialisasikan, untuk mengatasinya dengan mensosialisasikan kebijakan tersebut di satker secara mandiri.
d. Kurangnya sarana parkir halaman kantor dan adanya larangan parkir di sepanjang jalan area kantor, terutama ketika ada kegiatan pelayanan antara lain sumpah advokat, pelantikan Ketua PN, rapat pembinaan yang dihadiri oleh PN. Untuk sementara sambil menunggu adanya dukungan anggaran renovasi gedung, untuk parkir meminjam di Kantor Perhutani Jawa Tengah.

8. Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Nomor 3671/BP/PW1.1.1/IX/2025 tanggal 8 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memperoleh nilai sebesar **77,65** atau **BB (Sangat Baik)**. Dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terdapat beberapa rekomendasi yang perlu perbaikan dan sudah ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan akuntabilitas instansi. Adapun tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

1) **Rekomendasi:** Agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam melakukan Reviu Renstra dilakukan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan dalam pedoman. **Tindaklanjut**: Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kedepannya dalam melakukan reviu akan berpedoman pada SK SEKMA Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

2) **Rekomendasi:** Agar Target kinerja yang ditetapkan pada tahun berjalan (Perjanjian Kinerja Tahunan) selaras dengan Renstra yang telah ditetapkan di awal dan memastikan perubahan target tidak diakhir tahun. **Tindaklanjut**: Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kedepannya dalam penentuan target pada Perjanjian Kinerja Tahunan akan berpedoman pada target kinerja yang ditetapkan pada renstra. Sedangkan perubahan target di akhir tahun dilakukan berdasarkan hasil rapat kinerja yang dipimpin oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mempertimbangkan capaian kinerja sampai dengan bulan berjalan, keberhasilan

dan kendala. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bulanan/triwulan tahun 2024 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merubah target kinerja bertujuan untuk menyesuaikan capaian atas target kinerja tahun 2024 supaya lebih menantang. Dengan dilakukan analisis data yang komprehensif dan dilakukan evaluasi penentuan target supaya IKU Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan lebih baik lagi dan target menjadi realistis untuk dicapai dan berjangka waktu.

B. Pengukuran Kinerja

1) **Rekomendasi**: Agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengembangkan dan menetapkan penggunaan aplikasi SIMONEVKU dalam hal pengumpulan dan pengukuran data kinerja. **Tindaklanjut**: Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Sudah Menetapkan Penggunaan Aplikasi Simonevku Dalam Hal Pengumpulan Dan Pengukuran Data Kinerja, Hal Ini Sesuai Dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 319/KPT.W12-U/SK.TI1.1.1/IX/2024 Tanggal 26 September 2024 Tentang Pemberlakuan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (SIMONEVKU) Pada Pengadilan Tinggi Semarang. Sedangkan Untuk Pengembangan, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Sedang Melakukan Pengembangan Aplikasi Menyesuaikan Dengan Iku Terbaru Sesuai Dengan Yang Tertuang Dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2701/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

C. Pelaporan Kinerja

1) **Rekomendasi**: Agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memberikan informasi yang memadai terkait capaian kinerja dalam satu periode renstra (2020 – 2024). **Tindaklanjut**: Informasi terkait capaian kinerja dalam satu periode renstra 2020-2024 akan dijabarkan pada BAB I dokumen renstra 2025-2029 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1) **Rekomendasi**: Agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan workshop Evaluasi SAKIP untuk para evaluator yang melakukan evaluasi SAKIP. **Tindaklanjut**: Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah mengajukan usulan DIKLAT SAKIP/Evaluasi SAKIP Tahun 2026 melalui form usulan yang di fasilitasi oleh Biro Perencanaan Mahkamah Agung dan BSDK Mahkamah Agung.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapatkan total alokasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar sebesar Rp57.390.630.000,00 (Lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp482.135.000,00 (Empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp57.390.630.000,00 (Lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), yang meliputi:

a. Belanja Pegawai

Jumlah anggaran belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp50.461.684.000,00 (Lima puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari pagu awal tahun sebesar Rp42.271.639.000,00 (empat puluh dua

miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), tambahan pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp 8.190.045.000,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh juta empat puluh lima ribu rupiah) yang alokasikan untuk penambahan tunjangan pejabat negara. Sedangkan untuk realisasi belanja pegawai tahun 2025 yaitu 99,78% atau sebesar Rp50.350.195.498,00 (Lima puluh miliar tiga ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan sisa anggaran belanja pegawai 0,22% atau sebesar Rp111.488.502,00 (seratus sebelas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah). Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, dan uang makan.

b. Belanja Barang Operasional

Jumlah Anggaran Belanja Barang operasional tahun 2025 sebesar Rp6.577.051.000,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari pagu awal tahun sebesar Rp6.882.875.000,00 (enam miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdapat blokir anggaran pada akun perjalanan dinas yang kemudian ditarik ke eselon I sebesar Rp305.824.000,00 (tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). Sedangkan untuk realisasi belanja barang tahun 2025 yaitu 97,37% atau sebesar Rp6.405.338.667,00 (enam miliar empat ratus lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan sisa anggaran belanja barang operasional 2,63% atau sebesar Rp171.712.333,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Belanja barang Operasional merupakan pembelian barang dan/jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor.

c. Belanja Barang Non Operasional

Jumlah anggaran belanja barang non operasional tahun 2025 sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan realisasi belanja barang non operasional tahun 2025 adalah 100% atau sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta tujuh rupiah). Belanja barang non operasional berupa pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target.

d. Belanja Modal

Jumlah anggaran belanja modal tahun 2025 sebesar Rp350.895.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pagu awal tahun sebesar Rp224.910.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), tambahan pagu anggaran belanja modal untuk penambahan daya listrik sebesar Rp125.985.000,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk realisasi belanja modal tahun 2025 adalah 99,68% atau sebesar Rp349.785.100,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) dan sisa anggaran belanja modal 0,32% atau sebesar Rp1.109.900,00 (satu juta tujuh seratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau aset lainnya.

Realisasi anggaran DIPA (01) digambarkan pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 37. Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN
			Rp	%	Rp
1.	BELANJA PEGAWAI	50,461,684,000	50,350,195,498	99,78	111,488,502
2.	BELANJA BARANG OPERASIONAL	6,577,051,000	6,405,338,667	97,37	171,712,333
.3	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	1,000,000	1,000,000	100	0
.4	BELANJA MODAL	350,895,000	349,785,100	99,68	1,109,900
TOTAL REALISASI		Rp 57,390,630,000	**57,106,319,265**	**99,50**	284,310,735

Grafik 9. Realisasi Dipa Badan Urusan Administrasi (01)



Pada tahun 2025 terdapat sisa anggaran terutama pada pos belanja pegawai sebesar Rp111.488.502,00 (seratus sebelas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah) atau 0,22% dari pagu anggaran belanja pegawai. Adanya sisa anggaran ini dikarenakan adanya mutasi hakim pada akhir tahun 2025 yang mana anggaran sudah tidak memungkinkan diajukan revisi anggaran. Untuk pos belanja Operasional terdapat sisa sebesar Rp171.712.333,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 2,63% dari pagu anggaran belanja operasional. Adanya sisa anggaran ini dikarenakan adanya pembukaan blokir anggaran di triwulan IV sehingga pagu tidak terserap maksimal. Sedangkan untuk belanja modal terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.109.900,00 (satu juta seratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a) **Program** : Dukungan manajemen.

Kegiatan : Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya:

1. Indikator Sasaran Strategis 3, sebagai berikut:
    - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
    - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)
    - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)
    - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)
    - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)
    - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Sesuai program dan kegiatan DIPA (01) BUA, difokuskan pada pengelolaan anggaran DIPA, pelayanan umum, kepegawaian, serta operasional kantor untuk menunjang tugas kekuasaan kehakiman. Dukungan ini mencakup pembayaran gaji hakim dan ASN pengadilan, pengadaan barang konsumsi, koneksi internet, pemeliharaan rumah dinas dan kantor, perjalanan dinas, pelaksanaan bimtek, petugas kebersihan, dan pemeliharaan peralatan mesin pengadilan. Dengan adanya alokasi anggaran DIPA (01) BUA mendukung capaian masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tahun 2025.

b) **Program** : Dukungan manajemen.

Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya:

1. Indikator Sasaran Strategis 2 yaitu: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapat alokasi anggaran belanja modal sebesar Rp224.910.000 (Dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Selain itu, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga mendapatkan alokasi anggaran belanja tambahan (ABT) belanja modal untuk penambahan daya listrik sebesar Rp125.985.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan adanya penambahan daya listrik diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja di semua indikator. khususnya indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp482.135.000,00 (Empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pagu awal tahun sebesar Rp694.605.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah), terdapat blokir anggaran pada akun perjalanan dinas yang kemudian ditarik ke eselon I sebesar Rp212.470.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk realisasi tahun 2025 yaitu 98,13% atau sebesar Rp473.124.232,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan sisa anggaran 1,87% atau sebesar Rp9.010.768,00 (sembilan juta sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan koordinasi percepatan penyelesaian perkara dan operasional persidangan peradilan.

Tabel 38. Realisasi DIPA Badan Peradilan Umum (03) Tahun 2025

No.	JENIS BELANJA	DIPA BADILUM			
		PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN
			(Rp)	%	(Rp)
1	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 482.135.000	Rp. 473.124.232	98,13%	Rp. 9.010.768
TOTAL REALISASI		Rp. 482.135.000	Rp. 473.124.232	98,13%	Rp. 9.010.768

Grafik 10 Realisasi Dipa Badan Peradilan Umum (03)



Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

a) **Program** : Penegakan dan pelayanan hukum.
Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum.
Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator:

1. Indikator Sasaran Strategis 1, sebagai berikut :
   - Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
   - Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
   - Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
   - Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.
   - Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu.

Sesuai program dan kegiatan dan rincian belanja yang mendukung capaian masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tahun 2025. Dengan adanya alokasi anggaran DIPA (03) BADILUM mendukung operasional persidangan dan mendukung capaian indikator kinerja khususnya indikator Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu, indikator

Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju, Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court, dan Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu.

Tabel 39. Matrik Rincian Realisasi Anggaran 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	PAGU (Rp)	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
1	**Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	**Program**: Penegakan dan pelayanan hukum **Kegiatan**: Peningkatan manajemen peradilan umum	DIPA (03) Badan Peradilan Umum MA RI	**482.135.000**	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	100,298,000	97,110,759	99.64%
						Belanja Bahan (Rakor Percepatan Penyelesaian Perkara)	25,000,000	1.733.477.117	97,49%
						Belanja Bahan (ATK/Seminar Kit Bimtek Penyelesaian Perkara)	10,800,000	10,800,000	96,89%
						Belanja Bahan (Registrasi Berkas Perkara Banding)	27,818,000	27,795,000	99,97%
						Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	105,749,000	105,699,000	99,64%
						Belanja Perjalanan Biasa (Pembinaan dan Pengawasan Teknis dan Administrasi)	124,000,000	121,501,973	99,83%
						Belanja Perjalanan Biasa (Bimtek Penyelesaian Perkara)	30,000	0	0%
						Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Bimtek Penyelesaian Perkara)	88,440,000	87,000,000	80,35%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	PAGU (Rp)	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
		3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan 4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court 5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	**Program**: Dukungan Manajemen **Kegiatan**: 1) Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MA RI	**57.390.630.000**	• Belanja Sarana Prasarana Internal • Belanja Gaji dan Tunjangan • Belanja Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	350.895.000 50,461,684,000 700.000	349,785,100 50,350,195,498 700.000	99,68% 99,78% 100%
2.	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan							

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	PAGU (Rp)	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
3.	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA) 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM) 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA) 5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM) 6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI			• Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor • Belanja Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.577.051.000 300.000	6,405,338,667 300.000	97,37% 100,00%



BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 12 (dua belas) indikator kinerja. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari 12 (dua belas) indikator kinerja yang diperjanjikan, semua indikator kinerja telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.

Adapun rincian 12 (dua belas) indikator kinerja beserta capaian dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 40. Capaian dan Realisasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025

Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. **Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern**	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	100%	104,17
	2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	100%	104,17
	3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,17
	4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	99,86%	104,02
	5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	75%	79,39%	105,85

Sasaran/ Program Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	3,94	103,41
3. **Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	**1.**	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	77,24	108,01
	2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	99,71	103,86
	3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	95,34	103,46
	4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	100	104,17
	5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	85,00	101,19
	6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,3	3,3	100,00
Rata – Rata Capaian Kinerja					**103,87**

Capaian sasaran kegiatan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Revisi Renstra, Revisi IKU, Revisi RKT, maupun Revisi PKT tahun 2025.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain, adanya komitmen dari pimpinan dan segenap aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kebijakan yang mengatur peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan

ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang. Selain itu, faktor lain seperti keterlibatan pimpinan dan dibawahnya dalam perumusan dan penetapan kinerja, penentuan target yang memperhatikan capaian kinerja tahun lalu, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan/triwulan, dan revisi/reviu perjanjian kinerja juga turut mendukung capaian tersebut.

Secara Umum capaian kinerja sasaran pada Tahun 2025 telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tahun berikutnya.

Laporan kinerja menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Pada anggaran tahun 2025 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mendapatkan alokasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp57.390.630.000,00 (Lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), realisasi sebesar Rp57.106.319.265 (Lima puluh tujuh miliar seratus enam juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) atau 99,50% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 41. Realisasi Anggaran DIPA 01

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN
			Rp	%	Rp
1.	BELANJA PEGAWAI	50,461,684,000	50,350,195,498	99,78	111,488,502
2.	BELANJA BARANG OPERASIONAL	6,577,051,000	6,405,338,667	97,39	171,712,333
3.	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL	1.000.000	1.000.000	100	0
4.	BELANJA MODAL	350,895,000	349,785,100	99,68	1,109,900
	TOTAL REALISASI	57,390,630,000	57,106,319,265	99,50	284,310,735

Adapun untuk anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum Rp482.135.000 (Empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), realisasi sebesar Rp473.124.232 (Empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) atau 98,13% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 42. Realisasi Anggaran DIPA 03

No.	JENIS BELANJA	DIPA BADILUM			SISA ANGGARAN
		PAGU ANGGARAN Rp	REALISASI ANGGARAN		
			Rp	%	Rp
1	BELANJA OPERASIONAL	482,135,000	473,124,232	98,13%	9,010,768
TOTAL REALISASI		482,135,000	473,124,232	98,13%	9,010,768

B. REKOMENDASI

Laporan akuntabilitas kinerja adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah dan juga dapat digunakan untuk menyusun rencana kinerja anggaran tahun depan. Sebagai upaya penguatan akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan pelayanan publik yang maksimal serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan melaksanakan langkah-langkah kegiatan di tahun depan dengan cara sebagai berikut:

- Memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum harus menjaga integritas dan meningkatkan pelayanan publik. Komitmen dari Pimpinan, seluruh Hakim dan Aparatur Peradilan untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengadakan kegiatan ikrar bersama, komitmen bersama dan penandatangan pakta integritas.
- Putusan Pengadilan yang memenuhi memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat atau para pencari keadilan, dengan meningkatkan integritas, meningkatkan kualitas/professional dengan mengadakan kegiatan pembinaan dan pengawasan.

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengadakan kegiatan sosialisasi, pelatihan maupun pendidikan bagi hakim dan aparatur pengadilan.
- Penguatan pengawasan internal (oleh pimpinan dan pengawas bidang) dan dari eksternal.
- Menindaklanjuti laporan hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi dari Pengawas Bidang, Badilum, BUA MA, Badan Pengawasan, BPK.
- Melibatkan Pimpinan dan dibawahnya dalam proses perencanaan dan penetapan kinerja tahunan.
- Melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja yang baik sesuai ketentuan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berjenjang dan secara berkala bulanan/triwulan/semester/tahunan.
- Penguatan produktivitas dan administrasi penyelesaian perkara sesuai aturan yang berlaku dengan cara evaluasi implementasi SIPP harian/bulanan.
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan cara memelihara inovasi yang sudah ada dan mengembangkan inovasi layanan yang bisa meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja organisasi.
- Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mendukung untuk mencapai tujuan organisasi.
- Peningkatan sarana prasarana, dan kualitas lingkungan kerja agar produktivitas sumber daya manusia dapat berkembang. Misalkan melaksanakan kegiatan yang sesuai ketentuan dan dapat menunjang serta mendukung peningkatan kinerja individu dan organisasi.

SEMANGAT MOTIVASI DARI PIMPINAN

"Marwah peradilan tidak dijaga oleh siapa yang paling keras bersuara, melainkan oleh siapa yang paling mampu menjaga perilaku dan menata tutur kata,"



Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung RI

" Bekerja dengan sungguh – sungguh dan tidak melakukan perbuatan – perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik Institusi Mahkamah Agung "



Sugiyanto, S.H., M.H.
Sekretaris Mahkamah Agung RI





"Setiap Keputusan & Pelayanan Dipertanggungjawabkan Hukum, Etika dan Moral"

H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



LAMPIRAN

SK Tim Penyusun Laporan Kinerja
SK Tim Pereviu Laporan Kinerja
Laporan Pengukuran Kinerja Bulanan dan Triwulan
Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
Data Benchmarking Pengadilan Tingkat Banding
SK Penetapan Benchmark Pengadilan Tingkat Banding
Formulir Reviu Laporan Kinerja

1.

SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Nomor: 2/KPT.W12-U/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandaian dan keabsahan data/ informasi kinerja yang berkualitas;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2026.

KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan DIPA Pengadilan Tinggi Semarang Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 6 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Nomor : 2/KPT.W12-U/SK.OT1.6/I/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

JABATAN DALAM TIM	NAMA
Penanggungjawab	H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.
Koordinator Validasi Data	Budhy Hertantiyo, S.H., M.H.
Ketua	R. Seno Soeharjono Santoso, S.H., M.H.
Sekretaris	Drs. Muhamad Ashar, M.H.
Anggota	1. Suyadi, S.H., M.H. 2. Eko Budi Santoso, S.M.
Tim IT	1. Kartika Novita Sari, S.H. 2. Medha Anindya Hakim, A.Md.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

2.

SK TIM PEREVIU
LAPORAN KINERJA

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Nomor: 3/KPT.W12-U/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH,

Menimbang :

1. bahwa agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun dapat menggambarkan secara akuntabel dan berkualitas serta memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Reviu LKjIP pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a tersebut, dipandang perlu menunjuk Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;

3 Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TAHUN 2025.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama yang ada dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025;

KEDUA : Tim bertugas melakukan penelaahan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, serta memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yanh handal, akurat dan berkualitas;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 6 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Nomor : 3/KPT.W12-U/SK. OT1.6/I/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Ketua	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2.	Sekretaris	1. Yani Setya Wardani, S.E., S.H., M.M. 2. Radian Mahardika, S.E., S.H., M.M.
3.	Koordinator Kepaniteraan	R. Seno Soeharjono Santoso, S.H., M.H.
4.	Koordinator Kesekretariatan	Drs. Muhamad Ashar, M.H.
5.	Penanggungjawab Kepaniteraan Khusus Tindak Pidana Korupsi	Heronimus Sugiyanto, S.H., M.H.
6.	Penanggungjawab Kepaniteraan Pidana	Daryadi, S.H., M.H.
7.	Penanggungjawab Kepaniteraan Perdata	Abdul Munif, S.H., M.H.
8.	Penanggungjawab Kepaniteraan Hukum	Suyadi, S.H., M.H.
9.	Penanggungjawab Bagian Keuangan dan Pelaporan	Abu Sahid, S.E., M.M.
10.	Bagian Rencana Program dan Anggaran	Eko Budi Santoso, S.M.
11.	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Rohop Ogest Soritua Sinaga, S.H., M.H.
12.	Penanggungjawab Bagian Kepegawaian dan TI	Luthfi Azhar, S.I.P., M.M.
13.	Penanggungjawab IT	1. Erlangga Narendra Perdhana, S.Kom. 2. Krestian Tripratomo, S.E.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3.

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA BULANAN PKT TAHUN 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN JANUARI TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	50	50	100	104,17	50	50	100	104,17
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	91	91	100	104,17	91	91	100	104,17
3.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	3	3	100	104,17	3	3	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	134	88	65,67	131,34	134	88	65,67	131,34
5.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	96	50	50	100	104,17	50	50	100	104,17
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	91	91	100	104,17	91	91	100	104,17
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke	96	3	3	100	104,17	3	3	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

		Pengadilan Pengaju Tepat Waktu									
Rata-rata Total						108,05				108,05	

Semarang, 3 Februari 2025
Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Tjatur Wahjoe Boewana SP.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Februari				Realisasi s.d Bulan Februari			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	62	62	100	104,17	112	112	100	104,17
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	134	134	100	104,17	225	225	100	104,17
3.		Persentase perkara Pidana Khusus yang	96	6	6	100	104,17	9	9	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

		Diselesaikan Tepat Waktu									
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	158	80	50,63	101,26	292	168	57,53	115,06
5.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	96	62	62	100	104,17	112	112	100	104,17
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	134	134	100	104,17	225	225	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	6	6	100	104,17	9	9	100	104,17
		Rata-rata Total					103,75				105,72

Semarang, 3 Maret 2025

Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Tjatur Wahjoe Boewana SP.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN MARET TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Maret				Realisasi s.d Bulan Maret			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	53	53	100	104,17	165	165	100	104,17
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	61	61	100	104,17	286	286	100	104,17
3.		Persentase perkara Pidana Khusus yang	96	4	4	100	104,17	13	13	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

		Diselesaikan Tepat Waktu									
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	118	76	64,40	128,80	410	244	59,51	119,02
5.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96	63	63	98,72	102,83	63	63	98,72	102,83
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	96	53	53	100	104,17	165	165	100	104,17
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	61	61	100	104,17	286	286	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	4	4	100	104,17	13	13	100	104,17
		Rata-rata Total					107,08				105,85

Semarang, 8 April 2025

Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Tjatur Wahjoe Boewana SP

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN APRIL TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan April				Realisasi s.d Bulan April			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	42	42	100	104,17	207	207	100	104,17
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	51	51	100	104,17	337	337	100	104,17
3.		Persentase perkara Pidana Khusus yang	96	1	1	100	104,17	14	14	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

		Diselesaikan Tepat Waktu									
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	88	54	61,36	122,72	498	298	59,83	119,66
5.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96	-	-	-	-	63	63	98,72	102,83
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	96	42	42	100	104,17	207	207	100	104,17
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	51	51	100	104,17	337	337	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	1	1	100	104,17	14	14	100	104,17
		Rata-rata Total					106,82				105,93

Semarang, 2 Mei 2025

Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Tjatur Wahjoe Boewana SP.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN MEI TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Mei				Realisasi s.d Bulan Mei			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	45	45	100	104,17	252	252	100	104,17
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	55	55	100	104,17	392	392	100	104,17
3.		Persentase perkara Pidana Khusus yang	96	5	5	100	104,17	19	19	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

		Diselesaikan Tepat Waktu									
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	74	40	54,05	108,10	572	338	59,09	118,18
5.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96	-	-	-	-	63	63	98,72	102,83
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	96	45	45	100	104,17	252	252	100	104,17
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	55	55	100	104,17	392	392	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	5	5	100	104,17	19	19	100	104,17
		Rata-rata Total					104,73				105,75

Semarang, 2 Juni 2025

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Suyadi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN JUNI TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juni				Realisasi s.d Bulan Juni			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	83	83	100	104,17	335	335	100	104,17
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	110	110	100	104,17	502	502	100	104,17
3.		Persentase perkara Pidana Khusus yang	96	9	9	100	104,17	28	28	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

		Diselesaikan Tepat Waktu									
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	156	71	45,51	91,02	728	409	56,18	112,36
5.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96	313	313	96,02	100,02	376	376	97,37	101,42
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	96	83	83	100	104,17	335	335	100	104,17
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	110	110	100	104,17	502	502	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	9	9	100	104,17	28	28	100	104,17
		Rata-rata Total					102,00				104,85

Semarang, 1 Juli 2025

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Suyadi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN JULI TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juli				Realisasi s.d Bulan Juli			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	83	83	100	104,17	418	418	100	104,17
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	133	133	100	104,17	635	635	100	104,17
3.		Persentase perkara Pidana Khusus yang	96	4	4	100	104,17	32	32	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

		Diselesaikan Tepat Waktu									
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	206	100	48,54	97,08	934	509	54,49	108,98
5.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96	-	-	-	-	376	376	97,37	101,42
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	96	83	83	100	104,17	418	418	100	104,17
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	133	133	100	104,17	635	635	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	4	4	100	104,17	32	32	100	104,17
		Rata-rata Total					103,15				104,42

Semarang, 1 Agustus 2025

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Suyadi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN AGUSTUS TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Agustus				Realisasi s.d Bulan Agustus			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	55	54	98,18	102,27	473	472	99,78	103,93
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	147	147	100	104,17	782	782	100	104,17
3.		Persentase perkara Pidana Khusus yang	96	3	3	100	104,17	35	35	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

		Diselesaikan Tepat Waktu									
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	197	94	47,71	95,42	1.131	603	53,31	106,62
5.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96	-	-	-	-	376	376	97,37	101,42
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	96	55	54	98,18	102,27	473	472	99,78	103,93
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	147	147	100	104,17	782	782	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	3	3	100	104,17	35	35	100	104,17
		Rata-rata Total					102,37				104,07

Semarang, 1 September 2025

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Suyadi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan September				Realisasi s.d Bulan September			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
						%				%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	63	62	98,41	102,51	536	534	99,63	103,78
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	96	155	155	100	104,17	937	937	100	104,17
3.		Persentase perkara Pidana Khusus yang	96	9	9	100	104,17	44	44	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

		Diselesaikan Tepat Waktu									
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	221	102	46,15	92,30	1.352	705	52,15	104,30
5.		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96	-	-	-	-	412	412	99,61	103,76
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	96	63	63	100	104,17	536	536	100	104,17
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	155	155	100	104,17	782	782	100	104,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	9	9	100	104,17	44	44	100	104,17
		Rata-rata Total					102,37				104,07

Semarang, 1 Oktober 2025

Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

R. Seno Soeharjono Santoso

4.

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA BULANAN REVISI PKT TAHUN 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN JANUARI TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, Transparan Akuntabel, Responsif dan Modern.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	96%	194	144	74,23	77,32	194	144	74,23	77,32
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	144	144	100,00	104,17	144	144	100,00	104,17
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	144	144	100,00	104,17	144	144	100,00	104,17
4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	73	72	98,63	102,74	73	72	98,63	102,74
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	107	0	0,00	0,00	107	0	0,00	0,00

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	100	100,00	104,17	-	100	100,00	104,17
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	100	100,00	108,52	-	100	100,00	108,52
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Januari				Realisasi s.d Bulan Januari			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
NILAI KINERJA BULANAN							**85,87**				**85,87**

Semarang, 6 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Februari				Realisasi s.d Bulan Februari			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, Transparan Akuntabel, Responsif dan Modern.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	96%	241	202	83,82	87,31	385	346	89,87	93,61
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	202	202	100,00	104,17	346	346	100,00	104,17
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	202	202	100,00	104,17	346	346	100,00	104,17
4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	50	50	100,00	104,17	123	122	99,19	103,32
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	141	5	3,55	4,73	248	5	2,02	2,69

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Februari				Realisasi s.d Bulan Februari			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	100	100,00	104,17	-	100	100,00	104,17
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	100	100,00	108,52	-	100	100,00	108,52
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Februari				Realisasi s.d Bulan Februari			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
NILAI KINERJA BULANAN							88,17				88,66

Semarang, 6 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN MARET TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Maret				Realisasi s.d Bulan Maret			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, Transparan Akuntabel, Responsif dan Modern.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	96%	125	118	94,40	98,33	471	464	98,51	102,62
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	118	118	100,00	104,17	464	464	100,00	104,17
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	118	118	100,00	104,17	464	464	100,00	104,17
4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	38	38	100,00	104,17	161	160	99,38	103,52
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	48	20	41,67	55,56	296	25	8,45	11,26

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Maret				Realisasi s.d Bulan Maret			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	3,95	3,95	103,67	-	3,95	3,95	103,67
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	100	100,00	104,17	-	100	100,00	104,17
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	100	100,00	108,52	-	100	100,00	108,52
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Maret				Realisasi s.d Bulan Maret			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
NILAI KINERJA BULANAN							97,84				92,76

Semarang, 6 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN APRIL TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan April				Realisasi s.d Bulan April			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, Transparan Akuntabel, Responsif dan Modern.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	96%	120	94	78,33	81,60	584	558	95,55	99,53
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	94	94	100,00	104,17	558	558	100,00	104,17
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	94	93	98,94	103,06	558	557	99,82	103,98
4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	51	51	100,00	104,17	212	211	99,53	103,68
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	62	56	90,32	120,43	358	81	22,63	30,17

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan April				Realisasi s.d Bulan April			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	100	100,00	104,17	-	100	100,00	104,17
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	94,15	94,15	102,17	-	98,54	98,54	106,93
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan April				Realisasi s.d Bulan April			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
NILAI KINERJA BULANAN							102,82				93,23

Semarang, 6 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN MEI TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Mei				Realisasi s.d Bulan Mei			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, Transparan Akuntabel, Responsif dan Modern.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	96%	172	105	61,05	63,59	730	663	90,82	94,61
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	105	105	100,00	104,17	663	663	100,00	104,17
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	105	106	100,95	105,16	663	663	100,00	104,17
4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	61	61	100,00	104,17	273	272	99,63	103,79
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	85	83	97,65	130,20	443	164	37,02	49,36

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Mei				Realisasi s.d Bulan Mei			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	99,99	99,99	104,16	-	100	100,00	104,16
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	93,74	93,74	101,73	-	97,58	97,58	105,89
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Mei				Realisasi s.d Bulan Mei			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
NILAI KINERJA BULANAN							101,88				95,16

Semarang, 6 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN JUNI TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Juni				Realisasi s.d Bulan Juni			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, Transparan Akuntabel, Responsif dan Modern.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	96%	287	202	70,38	73,32	950	865	91,05	94,85
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	202	202	100,00	104,17	865	865	100,00	104,17
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	202	202	100,00	104,17	865	865	100,00	104,17
4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	101	101	100,00	104,17	374	373	99,73	103,89
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	119	117	98,32	131,09	562	281	50,00	66,67

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Juni				Realisasi s.d Bulan Juni			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	3,84	3,84	100,79	-	3,90	3,90	102,23
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	99,97	99,97	104,14	-	99,99	99,99	104,16
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	94,76	94,76	102,83	-	97,11	97,11	105,38
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Juni				Realisasi s.d Bulan Juni			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
NILAI KINERJA BULANAN							103,08				98,19

Semarang, 6 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN JULI TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Juli				Realisasi s.d Bulan Juli			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, Transparan Akuntabel, Responsif dan Modern.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	96%	277	220	79,42	82,73	1142	1085	95,01	98,97
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	220	220	100,00	104,17	1085	1085	100,00	104,17
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	220	218	99,09	103,22	1085	1083	99,82	103,97
4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	56	56	100,00	104,17	430	429	99,77	103,92
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	136	135	99,26	132,35	698	416	59,60	79,47

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Juli				Realisasi s.d Bulan Juli			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	99,87	99,87	104,03	-	99,98	99,98	104,14
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	93,29	93,29	101,24	-	96,56	96,56	104,79
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Juli				Realisasi s.d Bulan Juli			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
NILAI KINERJA BULANAN							104,56				99,92

Semarang, 6 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN AGUSTUS TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Agustus				Realisasi s.d Bulan Agustus			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, Transparan Akuntabel, Responsif dan Modern.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	96%	259	205	79,15	82,45	1344	1290	95,98	99,98
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	205	205	100,00	104,17	1290	1290	100,00	104,17
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	205	200	97,56	101,63	1290	1283	99,46	103,60
4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	65	65	100,00	104,17	495	494	99,80	103,96
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	137	136	99,27	132,36	835	552	66,11	88,14

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Agustus				Realisasi s.d Bulan Agustus			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	99,94	99,94	104,10	-	99,97	99,97	104,14
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	92,92	92,92	100,84	-	96,11	96,11	104,29
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Agustus				Realisasi s.d Bulan Agustus			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
NILAI KINERJA BULANAN							104,24				101,18

Semarang, 6 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan September				Realisasi s.d Bulan September			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, Transparan Akuntabel, Responsif dan Modern.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	96%	253	227	89,72	93,46	1543	1517	98,31	102,41
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	227	227	100,00	104,17	1517	1517	100,00	104,17
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	227	220	96,92	100,95	1517	1503	99,08	103,21
4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	40	40	100,00	104,17	535	534	99,81	103,97
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	159	159	100,00	133,33	994	711	71,53	95,37

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan September				Realisasi s.d Bulan September			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	3,98	3,98	104,46	-	3,92	3,92	102,97
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	99,91	99,91	104,07	-	99,96	99,96	104,13
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	94,66	94,66	102,72	-	95,95	95,95	104,12
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan September				Realisasi s.d Bulan September			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
NILAI KINERJA BULANAN							105,92				102,54

Semarang, 6 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN OKTOBER TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Oktober				Realisasi s.d Bulan Oktober			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, Transparan Akuntabel, Responsif dan Modern.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	96%	235	223	94,89	98,85	1752	1740	99,32	103,45
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	223	223	100,00	104,17	1740	1740	100,00	104,17
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	223	223	100,00	104,17	1740	1726	99,20	103,33
4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	70	70	100,00	104,17	605	504	99,83	103,99
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	139	139	100,00	133,33	1133	850	75,02	100,03

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Oktober				Realisasi s.d Bulan Oktober			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	99,14	99,14	103,27	-	99,88	99,88	104,04
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	93,98	93,98	101,99	-	95,75	95,75	103,91
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Oktober				Realisasi s.d Bulan Oktober			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
NILAI KINERJA BULANAN							107,13				103,27

Semarang, 6 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan November				Realisasi s.d Bulan November			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, Transparan Akuntabel, Responsif dan Modern.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	96%	186	186	100,00	104,17	1926	1926	100,00	104,17
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	186	186	100,00	104,17	1926	1926	100,00	104,17
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	186	187	100,54	104,73	1926	1913	99,33	103,46
4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	39	39	100,00	104,17	644	643	99,84	104,00
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	135	135	100,00	133,33	1268	985	77,68	103,58

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan November				Realisasi s.d Bulan November			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	98,97	98,97	103,09	-	99,80	99,80	103,96
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	93,26	93,26	101,20	-	95,52	95,52	103,66
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan November				Realisasi s.d Bulan November			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
NILAI KINERJA BULANAN							107,84				103,86

Semarang, 3 Desember 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
BULAN DESEMBER TAHUN 2025

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Desember				Realisasi s.d Bulan Desember			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, Transparan Akuntabel, Responsif dan Modern.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	96%	153	153	100,00	104,17	2079	2079	100,00	104,17
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96%	153	153	100,00	104,17	2079	2079	100,00	104,17
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	153	166	108,50	113,02	2079	2079	100,00	104,17
4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	48	48	100,00	104,17	692	691	99,86	104,02
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e- Berpadu	75%	105	105	100,00	133,33	1373	1090	79,39	105,85

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Desember				Realisasi s.d Bulan Desember			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	3,97	3,97	104,20	-	3,94	3,94	103,41
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	77,24	77,24	108,01	-	77,24	77,24	108,01
8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	98.71	98,71	102,82	-	99,71	99,71	103,86
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	93,27	93,27	101,22	-	95,34	95,34	103,46
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	100	100,00	104,17	-	100	100,00	104,17
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	85	85,00	101,19	-	85	85,00	101,19

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Bulan Desember				Realisasi s.d Bulan Desember			
				Input	Realisasi		Capaian (%)	Input	Realisasi		Capaian (%)
					Output	%			Output	%	
12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	3,3	3,30	100,00	-	3,3	3,30	100,00
NILAI KINERJA BULANAN							106,70				103,87

Semarang, 5 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

5.

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN PKT TAHUN 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	165	165 100,00%	104,17									
2.		Persentase perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	286	286 100,00%	104,17									

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

3.		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	96	13	13 100,00%	104,17									
4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50	410	244 59,51%	119,02									
5.		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	96	63	98,72% (3,95)	102,83									

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	165	165 100,00%	104,17										
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	286	286 100,00%	104,17										
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	96	13	13 100,00%	104,17										
						105,85										

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

Semarang, 8 April 2025

Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Tjatur Wahjoe Boewana SP.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	165	165 100,00%	104,17	335	335 100,00%	104,17						
2.		Persentase perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	286	286 100,00%	104,17	502	502 100,00%	104,17						
3.		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	96	13	13 100,00%	104,17	28	28 100,00%	104,17						

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50	410	244 59,51%	119,02	728	409 56,18%	112,36						
5.		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	96	63	98,72% (3,95)	102,83	63	97,37% (3,84)	101,42						
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	165	165 100,00%	104,17	335	335 100,00%	104,17						
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	286	286 100,00%	104,17	502	502 100,00%	104,17						

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	96	13	13 100,00%	104,17	28	28 100,00%	104,17						
						105,85			104,85						

Semarang, 1 Juli 2025

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Suyadi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	165	165 100,00%	104,17	335	335 100,00%	104,17	201	199 99,00%	103,13%			
2.		Persentase perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	96	286	286 100,00%	104,17	502	502 100,00%	104,17	435	435 100,00%	104,17			
3.		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	96	13	13 100,00%	104,17	28	28 100,00%	104,17	16	16 100,00%	104,17			

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50	410	244 59,51%	119,02	728	409 56,18%	112,36	1.352	705 52,15%	104,30			
5.		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	96	63	98,72% (3,95)	102,83	63	97,37% (3,84)	101,42	36	99,61% (3,98)	103,76			
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	165	165 100,00%	104,17	335	335 100,00%	104,17	201	200 99,50%	103,65			
7.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	96	286	286 100,00%	104,17	502	502 100,00%	104,17	435	435 100,00%	104,17			

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	96	13	13 100,00%	104,17	28	28 100,00%	104,17	16	16 100,00%	104,17			
						105,85			104,85						

Semarang, 1 Oktober 2025
Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

R. Seno Soeharjono Santoso

6.

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN REVISI PKT TAHUN 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Output Realisasi	Capaian (%)	Input	Output Realisasi	Capaian (%)	Input	Output Realisasi	Capaian (%)	Input	Output Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96	471	464 98,51	102,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96	464	464 100	104,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96	464	464 100	104,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96	161	160 99,38	103,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	75	296	25 8,45	11,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	3,95 3,95	103,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	100 100	104,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	100 100	108,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja						92,76										

Semarang, 6 November 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Output Realisasi	Capaian (%)	Input	Output Realisasi	Capaian (%)	Input	Output Realisasi	Capaian (%)	Input	Output Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96	471	464 98,51	102,62	468	401 82,51	85,95	-	-	-	-	-	-
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96	464	464 100	104,17	401	401 100,00%	104,17	-	-	-	-	-	-
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96	464	464 100	104,17	401	401 100,00%	104,17	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96	161	160 99,38	103,52	213	213 100	104,17	-	-	-	-	-	-
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	75	296	25 8,45	11,26	266	256 96,24	128,32	-	-	-	-	-	-
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	3,95 3,95	103,67	-	3,84 3,84	100,79	-	-	-	-	-	-
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	- -	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@ pt-semarang.go.id

8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	100 100	104,17	-	99,99 99,99	104,16	-	-	-	-	-	-
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	100 100	108,52	-	94,22 94,22	102,25	-	-	-	-	-	-
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	- -	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	- -	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	- -	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja						92,76			104,25							

Semarang, 6 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Output Realisasi	Capaian (%)	Input	Output Realisasi	Capaian (%)	Input	Output Realisasi	Capaian (%)	Input	Output Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96	471	464 98,51	102,62	468	401 82,51	85,95	678	652 96,17	100,17	-	-	-
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96	464	464 100	104,17	401	401 100,00%	104,17	652	652 100,00%	104,17	-	-	-
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96	464	464 100	104,17	401	401 100,00%	104,17	652	638 97,85	101,93	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96	161	160 99,38	103,52	213	213 100	104,17	161	161 100	104,17	-	-	-
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	75	296	25 8,45	11,26	266	256 96,24	128,32	432	430 99,54	132,72	-	-	-
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	3,95 3,95	103,67	-	3,84 3,84	100,79	-	3,98 3,98	104,46	-	-	-
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	- -	-	-	- -	-	-	- -	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	100 100	104,17	-	99,99 99,99	104,16	-	99,91 99,91	104,07	-	-	-
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	100 100	108,52	-	94,22 94,22	102,25	-	93,62 93,62	101,60	-	-	-
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	- -	-	-	- -	-	-	- -	-	-	-	-
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	- -	-	-	- -	-	-	- -	-	-	-	-

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja						92,76			104,25			106,66				

Semarang, 6 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2025

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Output Realisasi	Capaian (%)	Input	Output Realisasi	Capaian (%)	Input	Output Realisasi	Capaian (%)	Input	Output Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96	471	464 98,51	102,62	468	401 82,51	85,95	678	652 96,17	100,17	562	562 100	104,17
2.		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	96	464	464 100	104,17	401	401 100,00%	104,17	652	652 100,00%	104,17	562	562 100	104,17
3.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96	464	464 100	104,17	401	401 100,00%	104,17	652	638 97,85	101,93	562	576 102,49	106,76

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

4.		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96	161	160 99,38	103,52	213	213 100	104,17	161	161 100	104,17	157	157 100	104,17
5.		Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	75	296	25 8,45	11,26	266	256 96,24	128,32	432	430 99,54	132,72	379	379 100	133,33
6.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	-	3,95 3,95	103,67	-	3,84 3,84	100,79	-	3,98 3,98	104,46	-	3,97 3,97	104,20
7.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	- -	-	-	- -	-	-	- -	-	-	77,24 77,24	108,01

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

8.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	-	100 100	104,17	-	99,99 99,99	104,16	-	99,91 99,91	104,07	-	98,94 98,94	103,06
9.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	-	100 100	108,52	-	94,22 94,22	102,25	-	93,62 93,62	101,60	-	93,50 93,50	101,47
10.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA)	96,00	-	- -	-	-	- -	-	-	- -	-	-	100 100	104,17
11.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	- -	-	-	- -	-	-	- -	-	-	85 85	101,19

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jln. Pahlawan No. 19 Telp. 024-8448754 Fax. 024-8311459
Semarang - Jawa Tengah 50243
pt-semarang.go.id e-mail : info@pt-semarang.go.id

12.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	- -	-	-	- -	-	-	- -	-	-	3,30 3,30	100
Rata-rata Capaian Kinerja						**92,76**			**104,25**			**106,66**			**106,23**

Semarang, 5 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

7.

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2025

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti. Transparan dan Akuntabel.	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	96%	100,00%	104,17%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	50%	59.51%	119,02%
		3. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	96%	98,72% (TW I)	102,83% (TW I)

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Meningkatnya perkara yang diselesaikan tepat waktu	1. Penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim dan aparatur peradilan 2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara sesuai aturan yang berlaku. 3. Waktu penyelesaian perkara kurang dari 3 bulan 4. Berinovasi terhadap layanan yang bisa diberikan secara maksimal kepada para pencari keadilan.	Perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu	1. Melakukan pengawasan bidang dan pengawasan daerah. 2. Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat atau para pencari keadilan. Antara lain mengikuti pelatihan, bintek dan mengikuti pembinaan. 3. Melakukan monitoring terhadap evaluasi implementasi SIPP (EIS) meliputi kinerja, kepatuhan dan kelengkapan. 4. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan public antara lain penguatan pengawasan bidang, pembinaan oleh pimpinan, komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan, pendampingan dan pelatihan petugas PTSP, mengevaluasi hasil survei IKM dan menindaklanjuti/perbaikan di nilai-nilai survei yang kurang 5. Waktu penyelesaian perkara tepat waktu 6. Pemberian kompensasi atau layanan tanpa antri apabila layanan yang diterima tidak sesuai dan merugikan pengguna layanan. 7. Monitoring dan evaluasi kinerja 8. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja
2.	Meningkatnya perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding		Para pencari keadilan yang tidak puas terhadap putusan banding	
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan		*Stakeholder* yang tidak puas terhadap layanan peradilan	

				dan sarana pelayanan 9. Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP. 10. Secara rutin bulanan dilakukan rapat evaluasi kinerja yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 11. Seluruh bidang secara rutin bulanan membuat laporan kegiatan bagian. 12. Secara rutin harian/mingguan dilakukan apel dan pembinaan petugas PTSP. 13. Memperbaiki dan renovasi sarana prasarana PTSP untuk mendukung peningkatan kinerja. 14. Mengevaluasi atas monev kinerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	96%	100%	104,17%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju harus tepat waktu	Melakukan kordinasi dan pengawasan administrasi pengiriman putusan.	Putusan yang dikirim ke pengadilan tidak tepat waktu	Melakukan monitoring putusan dan monitoring pengiriman salinan putusan.

Semarang. April 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	96%	100,00%	104,17%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	50%	56,18%	112,36%
		3. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	96%	97,37% (TW II)	101,42% (TW II)

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Meningkatnya perkara yang diselesaikan tepat waktu	1. Penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim dan aparatur peradilan 2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara sesuai aturan yang berlaku. 3. Waktu penyelesaian perkara kurang dari 3 bulan 4. Berinovasi terhadap layanan yang bisa diberikan secara maksimal kepada para pencari keadilan.	Perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu	1. Melakukan pengawasan bidang dan pengawasan daerah. 2. Penguatan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat atau para pencari keadilan. Antara lain mengikuti pelatihan, bintek dan mengikuti pembinaan. 3. Melakukan monitoring terhadap evaluasi implementasi SIPP (EIS) meliputi kinerja, kepatuhan dan kelengkapan. 4. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan public antara lain penguatan pengawasan bidang, pembinaan oleh pimpinan, komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan, pendampingan dan pelatihan petugas PTSP, mengevaluasi hasil survei IKM dan menindaklanjuti/perbaikan di nilai-nilai survei yang kurang 5. Waktu penyelesaian perkara tepat waktu 6. Pemberian kompensasi atau layanan tanpa antri apabila layanan yang diterima tidak sesuai dan merugikan pengguna layanan. 7. Monitoring dan evaluasi kinerja
2.	Meningkatnya perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding		Para pencari keadilan yang tidak puas terhadap putusan banding	
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan		*Stakeholder* yang tidak puas terhadap layanan peradilan	

				8. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dan sarana pelayanan 9. Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP. 10. Secara rutin bulanan dilakukan rapat evaluasi kinerja yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 11. Seluruh bidang secara rutin bulanan membuat laporan kegiatan bagian. 12. Secara rutin harian/mingguan dilakukan apel dan pembinaan petugas PTSP. 13. Memperbaiki dan renovasi sarana prasarana PTSP untuk mendukung peningkatan kinerja. 14. Mengevaluasi atas monev kinerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	96%	100%	104.17%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju harus tepat waktu	Melakukan kordinasi dan pengawasan administrasi pengiriman putusan.	Putusan yang dikirim ke pengadilan tidak tepat waktu	Melakukan monitoring putusan dan monitoring pengiriman salinan putusan.

Semarang, Juli 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%	99,67%	103,82%
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	50%	52,15%	104,30%
		3. index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	96%	99,61%	103,76%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Meningkatnya perkara yang diselesaikan tepat waktu	1. Penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim dan aparatur peradilan 2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara sesuai aturan yang berlaku 3. Waktu penyelesaian perkara kurang dari 3 bulan 4. Berinovasi terhadap layanan yang bisa diberikan secara maksimal kepada para pencari keadilan	Perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu	1. Melakukan Pengawasan Bidang Dan Pengawasan Daerah 2. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Menghasilkan Putusan Yang Dapat Memenuhi Rasa Keadilan Bagi Masyarakat Atau Para Pencari Keadilan. Antara Lain Mengikuti Pelatihan, Bimtek Dan Mengikuti Pembinaan. 3. Melakukan Monitoring Terhadap Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Meliputi Kinerja, Kepatuhan Dan Kelengkapan. 4. Penguatan Organisasi Untuk Meningkatkan Kepercayaan Public Antara Lain Penguatan Pengawasan Bidang, Pembinaan Oleh Pimpinan, Komitmen Bersama Untuk Meningkatkan Pelayanan, Pendampingan Dan Pelatihan Petugas PTSP, Mengevaluasi Hasil Survey IKM Dan Menindaklanjuti/Perbaikan Di Nilai-Nilai Survei Yang Kurang. 5. Waktu Penyelesaian Perkara Tepat Waktu. 6. Pemberian Kompensasi Atau Layanan Tanpa Antri Apabila Layanan Yang Diterima Tidak Sesuai Dan Merugikan Pengguna Layanan.
2.	Meningkatnya perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari Upaya hukum banding		Para pencari keadilan yang tidak puas terhadap putusan banding	
3.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap layanan peradilan		*Stakeholder* yang tidak puas terhadap layanan peradilan	

				7. Monitoring Dan Evaluasi Kinerja. 8. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Kerja Dan Sarana Pelayanan. 9. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi AKIP. 10. Secara Rutin Bulanan Dilakukan Rapat Evaluasi Kinerja Yang Dipimpin Oleh Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. 11. Seluruh bidang secara rutin bulanan membuat laporan kegiatan bagian. 12. Secara rutin harian/mingguan dilakukan apel pagi dan pembinaan petugas PTSP. 13. Memperbaiki dan renovasi sarana dan prasarana PTSP untuk mendukung peningkatan kinerja. 14. Mengevaluasi atas monev kinerja.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkaatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	96%	99,83%	103,99%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju harus tepat waktu	Melakukan koordinasi dan pengawasan administrasi pengiriman putusan	Putusan yang dikirim ke pengadilan tidak tepat waktu	Melakukan monitoring putusan dan monitoring pengiriman Salinan putusan.

Semarang, 1 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah



Mochamad Hatta

8.

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI REVISI RENCANA AKSI TAHUN 2025

Lampiran I : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025
Tanggal : 25 November 2025

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%	98,51%	102,62%
		2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.	96%	100%	104,17%
		3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,17%
		4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan *e-Court*	96%	99,38%	103,52%
		5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan *e- Berpadu*	75%	8,45%	11,26%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menerima dan meregister permohonan upaya hukum banding perkara pidana dan tipikor dari PN pengaju melalui aplikasi eberpadu	• Permohonan upaya hukum banding perkara pidana yang diajukan PN pengaju dilakukan pemeriksa kelengkapan dokumen laporan banding pada aplikasi eberpadu oleh kepaniteraan pidana, dilanjutkan dengan proses penetapan penahanan pasal 27 Ayat (1) dan pasal 27 Ayat (2). • Dokumen berkas perkara yang dikirim/diupload pada aplikasi SIPP oleh PN pengaju dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas bundel A dan bundel B, setelah dinyatakan lengkap berkas perkara di register (penomoran perkara) pada aplikasi SIPP tingkat banding.	• Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Jawa Tengah belum semua menerapkan aplikasi eberpadu dalam pelaksanaan upaya hukum banding perkara pidana • PN pengaju dokumen berkas perkara yang dikirim atau diupload kurang atau tidak lengkap	• Dilakukan sosialisasi dan monitoring penerapan penggunaan fitur Upaya hukum banding perkara pidana ke Pengadilan Tingkat Pertama • Dilakukan koordinasi dengan PN pengaju untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang kurang atau tidak lengkap

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.	Menerima dan meregister permohonan upaya hukum banding perkara perdata dari PN pengaju melalui aplikasi ecourt	• Permohonan upaya hukum banding perkara perdata yang diajukan PN pengaju melalui aplikasi ecourt tersinkron otomatis ke SIPP tingkat banding • Dokumen berkas perkara yang masuk pada aplikasi SIPP tingkat banding dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, setelah dinyatakan lengkap berkas perkara di register (penomoran perkara) pada aplikasi SIPP tingkat banding.	PN pengaju dokumen berkas perkara yang dikirim atau diupload kurang atau tidak lengkap	Dilakukan koordinasi dengan PN pengaju untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang kurang atau tidak lengkap
3.	Membuat penetapan majelis hakim sidang perkara pidana/perdata/tipikor	Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sesuai dengan perkara yang masuk	-	-
4.	Membuat penetapan hari sidang pertama dan court callender perkara pidana/perdata/tipikor	Majelis hakim membuat penetapan hari sidang pertama dan menyusun court callender	-	-
5.	Membuat berita acara sidang dan putusan perkara pidana/perdata/tipikor	Hakim membuat putusan dan panitera pengganti membantu membuat berita acara sidang	-	-
6.	Mengupload softcopy berita acara sidang dan putusan serta meminutasi perkara pidana/perdata/tipikor	Hakim mengupload dokumen putusan, panitera pengganti mengupload berita acara sidang dan kepaniteraan pidana/perdata/tipikor meminutasi setelah berkas perkara yang diserahkan dinyatakan lengkap	• Tidak bisa upload e-doc putusan/BA Sidang karena ukuran file terlalu besar • Tidak bisa upload e-doc putusan/BA Sidang karena format type file tidak sesuai • Tidak bisa input amar putusan karena jumlah karakter huruf pada amar putusan melebihi batas	• Ukuran file yang terlalu besar dilakukan kompres/ pemampatan ukuran file agar bisa diupload • Format type file e-doc disesuaikan dengan type file yang diijinkan pada aplikasi SIPP • Penginputan amar menyesuaikan jumlah

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			karakter yang diijinkan aplikasi SIPP	karakter yang tersedia pada kolom amar putusan
7.	Mengirim Salinan dokumen putusan ke pn pengaju secara elektronik	Pengiriman Salinan putusan 1. Perkara perdata dilakukan melalui aplikasi SIPP Tingkat banding yang tersinkron otomatis ke aplikasi ecourt 2. Perkara pidana dan tipikor dilakukan melalui SIPP Tingkat banding yang tersinkronisasi otomatis pada aplikasi e-berpadu	-	-
8.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara	Kepaniteraan hukum melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara baik secara manual maupun elektronik (SIPP dan EIS Tingkat banding)	-	-
9.	Mendata, mengidentifikasi, dan mengevaluasi Kendala dan permasalahan penanganan perkara, serta mencari Solusi yang tepat	Kepaniteraan melakukan evaluasi setiap bulan melalui rapat kepaniteraan yang dipimpin oleh panitera	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	3,95	103,67%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menetapkan SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menetapkan SOP pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	-	-
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTSP	• Penanggungjawab Palayanan PTSP dan Pengawas PTSP melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan • Penanggungjawab Palayanan PTSP dan Pengawas PTSP melaksanakan briefing PTSP setiap minggu • Pengawas PTSP melakukan pengawas 2 (dua) kali dalam sehari	-	-
3.	Melengkapi informasi produk, syarat, prosedur dan biaya layanan baik secara manual maupun digital	• Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Menyusun data informasi produk, syarat, prosedur dan biaya layanan PTSP. • Sub bag. TURT membuat dan mencetak brosur/pamflet informasi layanan PTSP serta menempatkan pada meja dan ruang tunggu PTSP	-	-
4.	Memberikan pelatihan pelayanan prima kepada petugas PTSP	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bekerjasama dengan mitra kerja (Bank BRI) dalam memberikan pelatihan tentang pelayanan yang prima	-	-
5.	Memberikan pelatihan pelayanan untuk kaum disabilitas kepada petugas PTSP	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bekerjasama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam memberikan pelatihan tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
6.	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan pengadilan	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pemberian layanan PTSP termasuk penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas	-	-
7.	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey kepuasan masyrakat dan membuat tindaklanjut	• Tim survei memberikan kuesioner berupa link survei kepuasan masyarakat secara elektronik kepada pengguna layanan PTSP • Membuat laporan survei kepuasan Masyarakat pengguna layanan PTSP Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setiap triwulan dan melakukan tindaklanjut pada 3 unsur layanan dengan nilai terendah	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	-
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	100	104,17%
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	100	108,52%
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA).	96,00	-	-
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	-
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan atau sosialisasi baik secara klasikal maupun non-klasikal	Sub bagian kepegawaian membuat Analisa kebutuhan pelatihan, usulan diklat dan bimtek untuk pegawai ASN Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	-	-
2.	Memantau kedisiplinan dan evaluasi kinerja dan kehadiran	Sub bagian kepegawaian mendokumentasikan penilaian kinerja pegawai (SKP) setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan, serta mengelola data kehadiran, ijin dan cuti hakim dan pegawai	Absensi kehadiran hakim dan pegawai tidak sesuai.	Sub bagian kepegawaian melakukan konfirmasi absensi setiap minggu berdasarkan bukti kehadiran pada mesin faceprint.
3.	Menyusun angka dasar (baseline) anggaran tahun yang akan datang	Sub bagian rencana program dan anggaran melakukan penyusunan angka dasar (baseline) anggaran untuk tahun yang akan datang berdasarkan jumlah hakim dan pegawai serta kebutuhan operasional kantor dan kebutuhan sarana dan prasarana selama 1 (satu) tahun anggaran	-	-
4.	Melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan jadwal RPD Halaman III DIPA	Sub bagian rencana program dan anggaran melakukan revisi data rencana penarikan dana di setiap awal triwulan di tahun berjalan melalui aplikasi SAKTI	-	-
5.	Mengajukan gaji dan UP/TUP secara tepat waktu	Pengelola keuangan setiap bulan melaksanakan rekon gaji, mengajukan pembayaran gaji menggunakan aplikasi SAKTI, dan mengelola dana UP/TUP untuk mendukung operasional kantor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
6.	Melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana halaman III DIPA	Sub bagian keuangan dan sub bagian TURT melaksanakan kegiatan operasional perkantoran berdasarkan kegiatan yang tercantum pada rencana kerja anggaran tahun berjalan	-	-
7.	Mencatat dan mendaftarkan dokumen kontraktual secara tepat waktu	PPK Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengadministrasi kegiatan khususnya pengadaan barang dan jasa serta mendaftarkan dokumen kontrak secara tepat waktu ke KPPN melalui aplikasi SAKTI	-	-
8.	Memonitoring dan evaluasi kinerja capaian output secara berkala	Sub bagian keuangan dan sub bagian RPA melakukan monitoring dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran setiap bulan melalui aplikasi OMSPAN dan Smart Monev kemenkeu	-	-
9.	Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	Sub bagian keuangan dan sub bagian RPA melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran setiap bulan melalui aplikasi OMSPAN dan Smart Monev kemenkeu	-	-
10.	Melakukan pemeliharaan barang milik negara secara berkala	Sub bagian TURT melakukan perawatan dan pemeliharaan aset Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara berkala maupun sesuai kondisi aset yang digunakan dalam operasional kantor	-	-
11.	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang milik negara	Sub bagian keuangan dan pelaporan dibantu sub bagian TURT melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang milik negara setiap semester	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
12.	Membuat laporan keuangan secara periodic	Sub bagian keuangan dan pelaporan Menyusun laporan keuangan semester I, triwulan III dan tahunan tahun berjalan	-	-
13.	Membuat laporan barang milk negara secara periodik	Sub bagian keuangan dan pelaporan Menyusun laporan barang milik negara semester I dan tahunan tahun berjalan	-	-
14.	Menyusun RKBMN	Sub bagian keuangan dan pelaporan Menyusun RKBMN untuk dasar anggaran pemeliharaan dan pengadaan aset	-	-
15.	Melaksanakan tata Kelola hibah	Sub bagian RPA melakukan telaah usulan permohonan hibah dari PN pengaju dan meneruskan ke Sekretaris MA melalui aplikasi E-Iplans Sub bagian TURT melakukan proses pengajuan nomor register hibah melalui aplikasi SEHATI DJPB	• Data dukung tidak lengkap • Format surat usulan permohonan tidak sesuai	Sub bagian RPA dan sub bagian TURT melakukan koordinasi dengan PN pengaju agar melakukan perbaikan dokumen usulan dan melengkapi data dukung

Semarang, 1 April 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta Y

Lampiran I : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025
Tanggal : 25 November 2025

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%	82,51%	85,95%
		2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.	96%	100%	104,17%
		3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	100%	104,17%
		4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan *e-Court*	96%	100%	104,17%
		5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan *e- Berpadu*	75%	96,24%	128,32%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menerima dan meregister permohonan upaya hukum banding perkara pidana dan tipikor dari PN pengaju melalui aplikasi eberpadu	• Permohonan upaya hukum banding perkara pidana yang diajukan PN pengaju dilakukan pemeriksa kelengkapan dokumen laporan banding pada aplikasi eberpadu oleh kepaniteraan pidana, dilanjutkan dengan proses penetapan penahanan pasal 27 Ayat (1) dan pasal 27 Ayat (2). • Dokumen berkas perkara yang dikirim/diupload pada aplikasi SIPP oleh PN pengaju dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas bundel A dan bundel B, setelah dinyatakan lengkap berkas perkara di register (penomoran perkara) pada aplikasi SIPP tingkat banding.	• Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Jawa Tengah belum semua menerapkan aplikasi eberpadu dalam pelaksanaan upaya hukum banding perkara pidana • PN pengaju dokumen berkas perkara yang dikirim atau diupload kurang atau tidak lengkap	• Dilakukan sosialisasi dan monitoring penerapan penggunaan fitur Upaya hukum banding perkara pidana ke Pengadilan Tingkat Pertama • Dilakukan koordinasi dengan PN pengaju untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang kurang atau tidak lengkap

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.	Menerima dan meregister permohonan upaya hukum banding perkara perdata dari PN pengaju melalui aplikasi ecourt	• Permohonan upaya hukum banding perkara perdata yang diajukan PN pengaju melalui aplikasi ecourt tersinkron otomatis ke SIPP tingkat banding • Dokumen berkas perkara yang masuk pada aplikasi SIPP tingkat banding dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, setelah dinyatakan lengkap berkas perkara di register (penomoran perkara) pada aplikasi SIPP tingkat banding.	PN pengaju dokumen berkas perkara yang dikirim atau diupload kurang atau tidak lengkap	Dilakukan koordinasi dengan PN pengaju untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang kurang atau tidak lengkap
3.	Membuat penetapan majelis hakim sidang perkara pidana/perdata/tipikor	Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sesuai dengan perkara yang masuk	-	-
4.	Membuat penetapan hari sidang pertama dan court callender perkara pidana/perdata/tipikor	Majelis hakim membuat penetapan hari sidang pertama dan menyusun court callender	-	-
5.	Membuat berita acara sidang dan putusan perkara pidana/perdata/tipikor	Hakim membuat putusan dan panitera pengganti membantu membuat berita acara sidang	-	-
6.	Mengupload softcopy berita acara sidang dan putusan serta meminutasi perkara pidana/perdata/tipikor	Hakim mengupload dokumen putusan, panitera pengganti mengupload berita acara sidang dan kepaniteraan pidana/perdata/tipikor meminutasi setelah berkas perkara yang diserahkan dinyatakan lengkap	• Tidak bisa upload e-doc putusan/BA Sidang karena ukuran file terlalu besar • Tidak bisa upload e-doc putusan/BA Sidang karena format type file tidak sesuai • Tidak bisa input amar putusan karena jumlah karakter huruf pada amar putusan melebihi batas karakter yang diijinkan aplikasi SIPP	• Ukuran file yang terlalu besar dilakukan kompres/ pemampatan ukuran file agar bisa diupload • Format type file e-doc disesuaikan dengan type file yang diijinkan pada aplikasi SIPP • Penginputan amar menyesuaikan jumlah karakter yang tersedia pada kolom amar putusan

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
7.	Mengirim Salinan dokumen putusan ke pn pengaju secara elektronik	Pengiriman Salinan putusan 1. Perkara perdata dilakukan melalui aplikasi SIPP Tingkat banding yang tersinkron otomatis ke aplikasi ecourt 2. Perkara pidana dan tipikor dilakukan melalui SIPP Tingkat banding yang tersinkronisasi otomatis pada aplikasi e-berpadu	-	-
8.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara	Kepaniteraan hukum melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara baik secara manual maupun elektronik (SIPP dan EIS Tingkat banding)	-	-
9.	Mendata, mengidentifikasi, dan mengevaluasi Kendala dan permasalahan penanganan perkara, serta mencari Solusi yang tepat	Kepaniteraan melakukan evaluasi setiap bulan melalui rapat kepaniteraan yang dipimpin oleh panitera	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	3,84	100,79%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menetapkan SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menetapkan SOP pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	-	-
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTSP	• Penanggungjawab Palayanan PTSP dan Pengawas PTSP melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan • Penanggungjawab Palayanan PTSP dan Pengawas PTSP melaksanakan briefing PTSP setiap minggu	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		• Pengawas PTSP melakukan pengawas 2 (dua) kali dalam sehari		
3.	Melengkapi informasi produk, syarat, prosedur dan biaya layanan baik secara manual maupun digital	• Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Menyusun data informasi produk, syarat, prosedur dan biaya layanan PTSP. • Sub bag. TURT membuat dan mencetak brosur/pamflet informasi layanan PTSP serta menempatkan pada meja dan ruang tunggu PTSP	-	-
4.	Memberikan pelatihan pelayanan prima kepada petugas PTSP	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bekerjasama dengan mitra kerja (Bank BRI) dalam memberikan pelatihan tentang pelayanan yang prima	-	-
5.	Memberikan pelatihan pelayanan untuk kaum disabilitas kepada petugas PTSP	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bekerjasama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam memberikan pelatihan tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas	-	-
6.	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan pengadilan	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pemberian layanan PTSP termasuk penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas	-	-
7.	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey kepuasan masyrakat dan membuat tindaklanjut	• Tim survei memberikan kuesioner berupa link survei kepuasan masyarakat secara elektronik kepada pengguna layanan PTSP • Membuat laporan survei kepuasan Masyarakat pengguna layanan PTSP	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setiap triwulan dan melakukan tindaklanjut pada 3 unsur layanan dengan nilai terendah		

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	-
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	99,99	104,16%
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	94,22	102,25%
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA).	96,00	-	-
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	-
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan atau sosialisasi baik secara klasikal maupun non-klasikal	Sub bagian kepegawaian membuat Analisa kebutuhan pelatihan, usulan diklat dan bimtek untuk pegawai ASN Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	-	-
2.	Memantau kedisiplinan dan evaluasi kinerja dan kehadiran	Sub bagian kepegawaian mendokumentasikan penilaian kinerja pegawai (SKP) setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan, serta mengelola data kehadiran, ijin dan cuti hakim dan pegawai	Absensi kehadiran hakim dan pegawai tidak sesuai.	Sub bagian kepegawaian melakukan konfirmasi absensi setiap minggu berdasarkan bukti kehadiran pada mesin faceprint.

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.	Menyusun angka dasar (baseline) anggaran tahun yang akan datang	Sub bagian rencana program dan anggaran melakukan penyusunan angka dasar (baseline) anggaran untuk tahun yang akan datang berdasarkan jumlah hakim dan pegawai serta kebutuhan operasional kantor dan kebutuhan sarana dan prasarana selama 1 (satu) tahun anggaran	-	-
4.	Melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan jadwal RPD Halaman III DIPA	Sub bagian rencana program dan anggaran melakukan revisi data rencana penarikan dana di setiap awal triwulan di tahun berjalan melalui aplikasi SAKTI	-	-
5.	Mengajukan gaji dan UP/TUP secara tepat waktu	Pengelola keuangan setiap bulan melaksanakan rekon gaji, mengajukan pembayaran gaji menggunakan aplikasi SAKTI, dan mengelola dana UP/TUP untuk mendukung operasional kantor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	• SKPP terlambat diterbitkan • SK Kenaikkan Pangkat tenaga teknis terlambat diterbitkan oleh dirjen badilum • Pengajuan penggantian UP terkendala tagihan yang diserahkan tidak tepat waktu	• Bendahara gaji melakukan koordinasi dengan KPPN terakit penerbitan SKPP • Sub bagian keuangan berkoordinasi dengan sub bagian kepegawaian agar SK Kenaikkan Pangkat tenaga teknis segera diterbitkan oleh dirjen badilum • Sub bagian keuangan berkoordinasi dengan sub bagian TURT agar lebih tertib dalam penyampaian tagihan
6.	Melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana halaman III DIPA	Sub bagian keuangan dan sub bagian TURT melaksanakan kegiatan operasional perkantoran berdasarkan kegiatan yang tercantum pada rencana kerja anggaran tahun berjalan	-	-
7.	Mencatat dan mendaftarkan dokumen kontraktual secara tepat waktu	PPK Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengadministrasi kegiatan khususnya	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		pengadaan barang dan jasa serta mendaftarkan dokumen kontrak secara tepat waktu ke KPPN melalui aplikasi SAKTI		
8.	Memonitoring dan evaluasi kinerja capaian output secara berkala	Sub bagian keuangan dan sub bagian RPA melakukan monitoring dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran setiap bulan melalui aplikasi OMSPAN dan Smart Monev kemenkeu	-	-
9.	Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	Sub bagian keuangan dan sub bagian RPA melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran setiap bulan melalui aplikasi OMSPAN dan Smart Monev kemenkeu	-	-
10.	Melakukan pemeliharaan barang milik negara secara berkala	Sub bagian TURT melakukan perawatan dan pemeliharaan aset Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara berkala maupun sesuai kondisi aset yang digunakan dalam operasional kantor	-	-
11.	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang milik negara	Sub bagian keuangan dan pelaporan dibantu sub bagian TURT melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang milik negara setiap semester	-	-
12.	Membuat laporan keuangan secara periodic	Sub bagian keuangan dan pelaporan Menyusun laporan keuangan semester I, triwulan III dan tahunan tahun berjalan	-	-
13.	Membuat laporan barang milk negara secara periodik	Sub bagian keuangan dan pelaporan Menyusun laporan barang milik negara semester I dan tahunan tahun berjalan	-	-
14.	Menyusun RKBMN	Sub bagian keuangan dan pelaporan Menyusun RKBMN untuk dasar anggaran pemeliharaan dan pengadaan aset	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
15.	Melaksanakan tata Kelola hibah	• Sub bagian RPA melakukan telaah usulan permohonan hibah dari PN pengaju dan meneruskan ke Sekretaris MA melalui aplikasi E-Iplans • Sub bagian TURT melakukan proses pengajuan nomor register hibah melalui aplikasi SEHATI DJPB	• Data dukung tidak lengkap • Format surat usulan permohonan tidak sesuai	Sub bagian RPA dan sub bagian TURT melakukan koordinasi dengan PN pengaju agar melakukan perbaikan dokumen usulan dan melengkapi data dukung

Semarang, 1 Juli 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

Lampiran I : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025
Tanggal : 25 November 2025

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%	96,17%	100,17%
		2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.	96%	100%	104,17%
		3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	97,85%	101,93%
		4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan *e-Court*	96%	100%	104,17%
		5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan *e- Berpadu*	75%	99,54%	132,72%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menerima dan meregister permohonan upaya hukum banding perkara pidana dan tipikor dari PN pengaju melalui aplikasi eberpadu	• Permohonan upaya hukum banding perkara pidana yang diajukan PN pengaju dilakukan pemeriksa kelengkapan dokumen laporan banding pada aplikasi eberpadu oleh kepaniteraan pidana, dilanjutkan dengan proses penetapan penahanan pasal 27 Ayat (1) dan pasal 27 Ayat (2). • Dokumen berkas perkara yang dikirim/diupload pada aplikasi SIPP oleh PN pengaju dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas bundel A dan bundel B, setelah dinyatakan lengkap berkas perkara di register (penomoran perkara) pada aplikasi SIPP tingkat banding.	• Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Jawa Tengah belum semua menerapkan aplikasi eberpadu dalam pelaksanaan upaya hukum banding perkara pidana • PN pengaju dokumen berkas perkara yang dikirim atau diupload kurang atau tidak lengkap	• Dilakukan sosialisasi dan monitoring penerapan penggunaan fitur Upaya hukum banding perkara pidana ke Pengadilan Tingkat Pertama • Dilakukan koordinasi dengan PN pengaju untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang kurang atau tidak lengkap

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.	Menerima dan meregister permohonan upaya hukum banding perkara perdata dari PN pengaju melalui aplikasi ecourt	• Permohonan upaya hukum banding perkara perdata yang diajukan PN pengaju melalui aplikasi ecourt tersinkron otomatis ke SIPP tingkat banding • Dokumen berkas perkara yang masuk pada aplikasi SIPP tingkat banding dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, setelah dinyatakan lengkap berkas perkara di register (penomoran perkara) pada aplikasi SIPP tingkat banding.	PN pengaju dokumen berkas perkara yang dikirim atau diupload kurang atau tidak lengkap	Dilakukan koordinasi dengan PN pengaju untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang kurang atau tidak lengkap
3.	Membuat penetapan majelis hakim sidang perkara pidana/perdata/tipikor	Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sesuai dengan perkara yang masuk	-	-
4.	Membuat penetapan hari sidang pertama dan court callender perkara pidana/perdata/tipikor	Majelis hakim membuat penetapan hari sidang pertama dan menyusun court callender	-	-
5.	Membuat berita acara sidang dan putusan perkara pidana/perdata/tipikor	Hakim membuat putusan dan panitera pengganti membantu membuat berita acara sidang	-	-
6.	Mengupload softcopy berita acara sidang dan putusan serta meminutasi perkara pidana/perdata/tipikor	Hakim mengupload dokumen putusan, panitera pengganti mengupload berita acara sidang dan kepaniteraan pidana/perdata/tipikor meminutasi setelah berkas perkara yang diserahkan dinyatakan lengkap	• Tidak bisa upload e-doc putusan/BA Sidang karena ukuran file terlalu besar • Tidak bisa upload e-doc putusan/BA Sidang karena format type file tidak sesuai • Tidak bisa input amar putusan karena jumlah karakter huruf pada amar putusan melebihi batas karakter yang diijinkan aplikasi SIPP	• Ukuran file yang terlalu besar dilakukan kompres/ pemampatan ukuran file agar bisa diupload • Format type file e-doc disesuaikan dengan type file yang diijinkan pada aplikasi SIPP • Penginputan amar menyesuaikan jumlah karakter yang tersedia pada kolom amar putusan

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
7.	Mengirim Salinan dokumen putusan ke pn pengaju secara elektronik	Pengiriman Salinan putusan 1. Perkara perdata dilakukan melalui aplikasi SIPP Tingkat banding yang tersinkron otomatis ke aplikasi ecourt 2. Perkara pidana dan tipikor dilakukan melalui SIPP Tingkat banding yang tersinkronisasi otomatis pada aplikasi e-berpadu	-	-
8.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara	Kepaniteraan hukum melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara baik secara manual maupun elektronik (SIPP dan EIS Tingkat banding)	-	-
9.	Mendata, mengidentifikasi, dan mengevaluasi Kendala dan permasalahan penanganan perkara, serta mencari Solusi yang tepat	Kepaniteraan melakukan evaluasi setiap bulan melalui rapat kepaniteraan yang dipimpin oleh panitera	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	3,98	104,46%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menetapkan SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menetapkan SOP pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	-	-
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTSP	• Penanggungjawab Palayanan PTSP dan Pengawas PTSP melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan • Penanggungjawab Palayanan PTSP dan Pengawas PTSP melaksanakan briefing PTSP setiap minggu	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		• Pengawas PTSP melakukan pengawas 2 (dua) kali dalam sehari		
3.	Melengkapi informasi produk, syarat, prosedur dan biaya layanan baik secara manual maupun digital	• Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Menyusun data informasi produk, syarat, prosedur dan biaya layanan PTSP. • Sub bag. TURT membuat dan mencetak brosur/pamflet informasi layanan PTSP serta menempatkan pada meja dan ruang tunggu PTSP	-	-
4.	Memberikan pelatihan pelayanan prima kepada petugas PTSP	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bekerjasama dengan mitra kerja (Bank BRI) dalam memberikan pelatihan tentang pelayanan yang prima	-	-
5.	Memberikan pelatihan pelayanan untuk kaum disabilitas kepada petugas PTSP	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bekerjasama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam memberikan pelatihan tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas	-	-
6.	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan pengadilan	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pemberian layanan PTSP termasuk penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas	Jalur guiding block belum sesuai dengan posisi meja PTSP yang baru	Telah dilakukan penyesuaian guiding block dengan posisi meja PTSP yang baru
7.	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey kepuasan masyrakat dan membuat tindaklanjut	• Tim survei memberikan kuesioner berupa link survei kepuasan masyarakat secara elektronik kepada pengguna layanan PTSP • Membuat laporan survei kepuasan Masyarakat pengguna layanan PTSP	Persepsi pengguna layanan dalam mengisi survey berbeda dengan apa yang dimaksud dalam pertanyaan survei.	Petugas PTSP melakukan pendampingan kepada pengguna layanan PTSP dalam pengisian survey kepuasan layanan PTSP.

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setiap triwulan dan melakukan tindaklanjut pada 3 unsur layanan dengan nilai terendah		

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	-	-
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	99.91	104,07%
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	93,62	101,60%
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA).	96,00	-	-
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	-	-
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan atau sosialisasi baik secara klasikal maupun non-klasikal	Sub bagian kepegawaian membuat Analisa kebutuhan pelatihan, usulan diklat dan bimtek untuk pegawai ASN Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	-	-
2.	Memantau kedisiplinan dan evaluasi kinerja dan kehadiran	Sub bagian kepegawaian mendokumentasikan penilaian kinerja pegawai (SKP) setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan, serta mengelola data kehadiran, ijin dan cuti hakim dan pegawai	Absensi kehadiran hakim dan pegawai tidak sesuai.	Sub bagian kepegawaian melakukan konfirmasi absensi setiap minggu berdasarkan bukti kehadiran pada mesin faceprint.

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.	Menyusun angka dasar (baseline) anggaran tahun yang akan datang	Sub bagian rencana program dan anggaran melakukan penyusunan angka dasar (baseline) anggaran untuk tahun yang akan datang berdasarkan jumlah hakim dan pegawai serta kebutuhan operasional kantor dan kebutuhan sarana dan prasarana selama 1 (satu) tahun anggaran	-	-
4.	Melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan jadwal RPD Halaman III DIPA	Sub bagian rencana program dan anggaran melakukan revisi data rencana penarikan dana di setiap awal triwulan di tahun berjalan melalui aplikasi SAKTI	-	-
5.	Mengajukan gaji dan UP/TUP secara tepat waktu	Pengelola keuangan setiap bulan melaksanakan rekon gaji, mengajukan pembayaran gaji menggunakan aplikasi SAKTI, dan mengelola dana UP/TUP untuk mendukung operasional kantor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	• SKPP terlambat diterbitkan • SK Kenaikkan Pangkat tenaga teknis terlambat diterbitkan oleh dirjen badilum • Pengajuan penggantian UP terkendala tagihan yang diserahkan tidak tepat waktu	• Bendahara gaji melakukan koordinasi dengan KPPN terakit penerbitan SKPP • Sub bagian keuangan berkoordinasi dengan sub bagian kepegawaian agar SK Kenaikkan Pangkat tenaga teknis segera diterbitkan oleh dirjen badilum • Sub bagian keuangan berkoordinasi dengan sub bagian TURT agar lebih tertib dalam penyampaian tagihan
6.	Melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana halaman III DIPA	Sub bagian keuangan dan sub bagian TURT melaksanakan kegiatan operasional perkantoran berdasarkan kegiatan yang tercantum pada rencana kerja anggaran tahun berjalan	Dalam pelaksaan kegiatan terkadang berubah dari jadwal yang ditentukan	Sub bagian keuangan berkoordinasi dengan sub bagian RPA untuk perubahan rencana penarikan dana melalui revisi halaman III DIPA
7.	Mencatat dan mendaftarkan dokumen kontraktual secara tepat waktu	PPK Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengadministrasi kegiatan khususnya	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		pengadaan barang dan jasa serta mendaftarkan dokumen kontrak secara tepat waktu ke KPPN melalui aplikasi SAKTI		
8.	Memonitoring dan evaluasi kinerja capaian output secara berkala	Sub bagian keuangan dan sub bagian RPA melakukan monitoring dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran setiap bulan melalui aplikasi OMSPAN dan Smart Monev kemenkeu	-	-
9.	Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	Sub bagian keuangan dan sub bagian RPA melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran setiap bulan melalui aplikasi OMSPAN dan Smart Monev kemenkeu	-	-
10.	Melakukan pemeliharaan barang milik negara secara berkala	Sub bagian TURT melakukan perawatan dan pemeliharaan aset Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara berkala maupun sesuai kondisi aset yang digunakan dalam operasional kantor	-	-
11.	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang milik negara	Sub bagian keuangan dan pelaporan dibantu sub bagian TURT melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang milik negara setiap semester	-	-
12.	Membuat laporan keuangan secara periodic	Sub bagian keuangan dan pelaporan Menyusun laporan keuangan semester I, triwulan III dan tahunan tahun berjalan	-	-
13.	Membuat laporan barang milk negara secara periodik	Sub bagian keuangan dan pelaporan Menyusun laporan barang milik negara semester I dan tahunan tahun berjalan	-	-
14.	Menyusun RKBMN	Sub bagian keuangan dan pelaporan Menyusun RKBMN untuk dasar anggaran pemeliharaan dan pengadaan aset	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
15.	Melaksanakan tata Kelola hibah	Sub bagian RPA melakukan telaah usulan permohonan hibah dari PN pengaju dan meneruskan ke Sekretaris MA melalui aplikasi E-Iplans Sub bagian TURT melakukan proses pengajuan nomor register hibah melalui aplikasi SEHATI DJPB	• Data dukung tidak lengkap • Format surat usulan permohonan tidak sesuai	Sub bagian RPA dan sub bagian TURT melakukan koordinasi dengan PN pengaju agar melakukan perbaikan dokumen usulan dan melengkapi data dukung

Semarang, 1 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochamad Hatta

Lampiran I : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025
Tanggal : 25 November 2025

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN IV
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%	100%	104.17%
		2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.	96%	100%	104.17%
		3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	96%	105.16%	109.54%
		4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan *e-Court*	96%	100%	104.17%
		5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan *e- Berpadu*	75%	100%	133,33%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menerima dan meregister permohonan upaya hukum banding perkara pidana dan tipikor dari PN pengaju melalui aplikasi eberpadu	• Permohonan upaya hukum banding perkara pidana yang diajukan PN pengaju dilakukan pemeriksa kelengkapan dokumen laporan banding pada aplikasi eberpadu oleh kepaniteraan pidana. dilanjutkan dengan proses penetapan penahanan pasal 27 Ayat (1) dan pasal 27 Ayat (2). • Dokumen berkas perkara yang dikirim/diupload pada aplikasi SIPP oleh PN pengaju dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas bundel A dan bundel B, setelah dinyatakan lengkap berkas perkara di register (penomoran perkara) pada aplikasi SIPP tingkat banding.	• Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Jawa Tengah belum semua menerapkan aplikasi eberpadu dalam pelaksanaan upaya hukum banding perkara pidana • PN pengaju dokumen berkas perkara yang dikirim atau diupload kurang atau tidak lengkap	• Dilakukan sosialisasi dan monitoring penerapan penggunaan fitur Upaya hukum banding perkara pidana ke Pengadilan Tingkat Pertama • Dilakukan koordinasi dengan PN pengaju untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang kurang atau tidak lengkap

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.	Menerima dan meregister permohonan upaya hukum banding perkara perdata dari PN pengaju melalui aplikasi ecourt	• Permohonan upaya hukum banding perkara perdata yang diajukan PN pengaju melalui aplikasi ecourt tersinkron otomatis ke SIPP tingkat banding • Dokumen berkas perkara yang masuk pada aplikasi SIPP tingkat banding dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, setelah dinyatakan lengkap berkas perkara di register (penomoran perkara) pada aplikasi SIPP tingkat banding.	PN pengaju dokumen berkas perkara yang dikirim atau diupload kurang atau tidak lengkap	Dilakukan koordinasi dengan PN pengaju untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen yang kurang atau tidak lengkap
3.	Membuat penetapan majelis hakim sidang perkara pidana/perdata/tipikor	Penunjukan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sesuai dengan perkara yang masuk	-	-
4.	Membuat penetapan hari sidang pertama dan court callender perkara pidana/perdata/tipikor	Majelis hakim membuat penetapan hari sidang pertama dan menyusun court callender	-	-
5.	Membuat berita acara sidang dan putusan perkara pidana/perdata/tipikor	Hakim membuat putusan dan panitera pengganti membantu membuat berita acara sidang	-	-
6.	Mengupload softcopy berita acara sidang dan putusan serta meminutasi perkara pidana/perdata/tipikor	Hakim mengupload dokumen putusan, panitera pengganti mengupload berita acara sidang dan kepaniteraan pidana/perdata/tipikor meminutasi setelah berkas perkara yang diserahkan dinyatakan lengkap	• Tidak bisa upload e-doc putusan/BA Sidang karena ukuran file terlalu besar • Tidak bisa upload e-doc putusan/BA Sidang karena format type file tidak sesuai • Tidak bisa input amar putusan karena jumlah karakter huruf pada amar putusan melebihi batas karakter yang diijinkan aplikasi SIPP	• Ukuran file yang terlalu besar dilakukan kompres/ pemampatan ukuran file agar bisa diupload • Format type file e-doc disesuaikan dengan type file yang diijinkan pada aplikasi SIPP • Penginputan amar menyesuaikan jumlah karakter yang tersedia pada kolom amar putusan

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
7.	Mengirim Salinan dokumen putusan ke pn pengaju secara elektronik	Pengiriman Salinan putusan 1. Perkara perdata dilakukan melalui aplikasi SIPP Tingkat banding yang tersinkron otomatis ke aplikasi ecourt 2. Perkara pidana dan tipikor dilakukan melalui SIPP Tingkat banding yang tersinkronisasi otomatis pada aplikasi e-berpadu	-	-
8.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara	Kepaniteraan hukum melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara baik secara manual maupun elektronik (SIPP dan EIS Tingkat banding)	-	-
9.	Mendata, mengidentifikasi, dan mengevaluasi Kendala dan permasalahan penanganan perkara, serta mencari Solusi yang tepat	Kepaniteraan melakukan evaluasi setiap bulan melalui rapat kepaniteraan yang dipimpin oleh panitera	-	-

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,81	3,97	104,20%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Menetapkan SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menetapkan SOP pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	-	-
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTSP	• Penanggungjawab Palayanan PTSP dan Pengawas PTSP melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan • Penanggungjawab Palayanan PTSP dan Pengawas PTSP melaksanakan briefing PTSP setiap minggu	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		• Pengawas PTSP melakukan pengawas 2 (dua) kali dalam sehari		
3.	Melengkapi informasi produk, syarat, prosedur dan biaya layanan baik secara manual maupun digital	• Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Menyusun data informasi produk, syarat, prosedur dan biaya layanan PTSP. • Sub bag. TURT membuat dan mencetak brosur/pamflet informasi layanan PTSP serta menempatkan pada meja dan ruang tunggu PTSP	-	-
4.	Memberikan pelatihan pelayanan prima kepada petugas PTSP	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bekerjasama dengan mitra kerja (Bank BRI) dalam memberikan pelatihan tentang pelayanan yang prima	-	-
5.	Memberikan pelatihan pelayanan untuk kaum disabilitas kepada petugas PTSP	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bekerjasama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam memberikan pelatihan tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas	-	-
6.	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan pengadilan	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pemberian layanan PTSP termasuk penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas	Jalur guiding block belum sesuai dengan posisi meja PTSP yang baru	Telah dilakukan penyesuaian guiding block dengan posisi meja PTSP yang baru
7.	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil survey kepuasan masyrakat dan membuat tindaklanjut	• Tim survei memberikan kuesioner berupa link survei kepuasan masyarakat secara elektronik kepada pengguna layanan PTSP • Membuat laporan survei kepuasan Masyarakat pengguna layanan PTSP	Persepsi pengguna layanan dalam mengisi survey berbeda dengan apa yang dimaksud dalam pertanyaan survei.	Petugas PTSP melakukan pendampingan kepada pengguna layanan PTSP dalam pengisian survey kepuasan layanan PTSP.

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setiap triwulan dan melakukan tindaklanjut pada 3 unsur layanan dengan nilai terendah		

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71,51	77,24	108,01%
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA)	96,00	98,94	103,06%
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM)	92,15	93,50	101,47%
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA).	96,00	100	104,17%
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM)	84,00	85	101,19%
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30	3,30	100,00%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan atau sosialisasi baik secara klasikal maupun non-klasikal	Sub bagian kepegawaian membuat Analisa kebutuhan pelatihan, usulan diklat dan bimtek untuk pegawai ASN Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	-	-
2.	Memantau kedisiplinan dan evaluasi kinerja dan kehadiran	Sub bagian kepegawaian mendokumentasikan penilaian kinerja pegawai (SKP) setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan, serta mengelola data kehadiran, ijin dan cuti hakim dan pegawai	Absensi kehadiran hakim dan pegawai tidak sesuai.	Sub bagian kepegawaian melakukan konfirmasi absensi setiap minggu berdasarkan bukti kehadiran pada mesin faceprint.

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.	Menyusun angka dasar (baseline) anggaran tahun yang akan datang	Sub bagian rencana program dan anggaran melakukan penyusunan angka dasar (baseline) anggaran untuk tahun yang akan datang berdasarkan jumlah hakim dan pegawai serta kebutuhan operasional kantor dan kebutuhan sarana dan prasarana selama 1 (satu) tahun anggaran	-	-
4.	Melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan jadwal RPD Halaman III DIPA	Sub bagian rencana program dan anggaran melakukan revisi data rencana penarikan dana di setiap awal triwulan di tahun berjalan melalui aplikasi SAKTI	-	-
5.	Mengajukan gaji dan UP/TUP secara tepat waktu	Pengelola keuangan setiap bulan melaksanakan rekon gaji, mengajukan pembayaran gaji menggunakan aplikasi SAKTI, dan mengelola dana UP/TUP untuk mendukung operasional kantor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	• SKPP terlambat diterbitkan • SK Kenaikkan Pangkat tenaga teknis terlambat diterbitkan oleh dirjen badilum • Pengajuan penggantian UP terkendala tagihan yang diserahkan tidak tepat waktu	• Bendahara gaji melakukan koordinasi dengan KPPN terakit penerbitan SKPP • Sub bagian keuangan berkoordinasi dengan sub bagian kepegawaian agar SK Kenaikkan Pangkat tenaga teknis segera diterbitkan oleh dirjen badilum • Sub bagian keuangan berkoordinasi dengan sub bagian TURT agar lebih tertib dalam penyampaian tagihan
6.	Melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana halaman III DIPA	Sub bagian keuangan dan sub bagian TURT melaksanakan kegiatan operasional perkantoran berdasarkan kegiatan yang tercantum pada rencana kerja anggaran tahun berjalan	Dalam pelaksaan kegiatan terkadang berubah dari jadwal yang ditentukan	Sub bagian keuangan berkoordinasi dengan sub bagian RPA untuk perubahan rencana penarikan dana melalui revisi halaman III DIPA
7.	Mencatat dan mendaftarkan dokumen kontraktual secara tepat waktu	PPK Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengadministrasi kegiatan khususnya	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		pengadaan barang dan jasa serta mendaftarkan dokumen kontrak secara tepat waktu ke KPPN melalui aplikasi SAKTI		
8.	Memonitoring dan evaluasi kinerja capaian output secara berkala	Sub bagian keuangan dan sub bagian RPA melakukan monitoring dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran setiap bulan melalui aplikasi OMSPAN dan Smart Monev kemenkeu	-	-
9.	Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	Sub bagian keuangan dan sub bagian RPA melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran setiap bulan melalui aplikasi OMSPAN dan Smart Monev kemenkeu	-	-
10.	Melakukan pemeliharaan barang milik negara secara berkala	Sub bagian TURT melakukan perawatan dan pemeliharaan aset Pengadilan Tinggi Jawa Tengah secara berkala maupun sesuai kondisi aset yang digunakan dalam operasional kantor	-	-
11.	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang milik negara	Sub bagian keuangan dan pelaporan dibantu sub bagian TURT melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang milik negara setiap semester	Terdapat BMN yang rusak berat belum dilakukan pengahapusan	Melakukan Inventarisasi BMN yang sudah Rusak Berat dan melakukan Proses Pengajuan Penghapusan BMN
12.	Membuat laporan keuangan secara periodic	Sub bagian keuangan dan pelaporan Menyusun laporan keuangan semester I, triwulan III dan tahunan tahun berjalan	-	-
13.	Membuat laporan barang milk negara secara periodik	Sub bagian keuangan dan pelaporan Menyusun laporan barang milik negara semester I dan tahunan tahun berjalan	-	-
14.	Menyusun RKBMN	Sub bagian keuangan dan pelaporan Menyusun RKBMN untuk dasar anggaran pemeliharaan dan pengadaan aset	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
15.	Melaksanakan tata Kelola hibah	Sub bagian RPA melakukan telaah usulan permohonan hibah dari PN pengaju dan meneruskan ke Sekretaris MA melalui aplikasi E-Iplans Sub bagian TURT melakukan proses pengajuan nomor register hibah melalui aplikasi SEHATI DJPB	• Data dukung tidak lengkap • Format surat usulan permohonan tidak sesuai	Sub bagian RPA dan sub bagian TURT melakukan koordinasi dengan PN pengaju agar melakukan perbaikan dokumen usulan dan melengkapi data dukung

Semarang, 5 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Mochammad Hatta Ali

9.

DATA BENCHMARKING PENGADILAN TINGKAT BANDING TAHUN 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id.. ditjen.badilum@mahkamah agung.go.id

Nomor : 425/DJU/OT1.6/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Data Target dan Capaian Kinerja Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2025

Jakarta, 20 Februari 2026

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 2049/SEK/SK /X II/2O22 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, sebagai bahan analisis perbandingan informasi target kinerja satuan kerja dengan realisasi kinerja (*benchmark*) di level nasional Tahun 2025 seluruh Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maka berikut kami lampirkan data target dan capaian kinerja nasional pada Pengadilan Tingkat Banding diseluruh di Indonesia tahun 2025.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

LAMPIRAN
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 425/DJU/OT1.5/II/2026
Tanggal 20 Februari 2026

BENCHMARK KINERJA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025

No	Kode Satker	Kode MS	Satuan Kerja	Sasaran Strategis I : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern														Sasaran Strategis II : Meningkatnya Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Publik			Sasaran Strategis III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional																	
				Indikator Kinerja														Indikator Kinerja			Indikator Kinerja																	
				Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu			Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju			Persentase putusan pengadilan yang dibuggedt pada direktori putusan			Persentase putusan perdata pada tingkat banding yang menggunakan eCourt			Persentase putusan pidana pada tingkat banding yang menggunakan eBerpadu			Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03			Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01			Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 03			Indeks Pengelolaan Aset Satuan Kerja		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	099062	0100	Pengadilan Tinggi Jakarta	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	96%	101%	90%	94%	105%	3,78	3,61	96%	71	87,48	123%	93	98,45	106%	93	90,75	98%	75	100	133%	75	87,45	117%	3,00	3,45	115%
2	099067	0200	Pengadilan Tinggi Bandung	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	41%	46%	3,78	3,97	105%	71	82,45	116%	93	93,2	100%	93	86,42	93%	75	93,3	124%	75	95,82	127%	3,00	3,18	106%
3	099090	0300	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	79%	88%	3,78	3,94	104%	71	77,24	109%	93	99,71	107%	93	95,34	103%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,3	110%
4	400343	0400	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	72%	80%	3,78	3,929	104%	71	78,5	111%	93	97,41	105%	93	91,37	98%	75	100	133%	75	89,85	120%	3,00	3,3	110%
5	099132	0500	Pengadilan Tinggi Surabaya	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	77%	85%	3,78	3,93	104%	71	75,87	107%	93	99,28	107%	93	93,18	100%	75	90,71	121%	75	87,99	117%	3,00	3,1	103%
6	099169	0600	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	99%	110%	96%	100%	104%	90%	80%	89%	3,78	3,9	103%	71	79,42	112%	93	99,48	107%	93	99,3	107%	75	100	133%	75	85,77	114%	3,00	3,25	108%
7	099189	0700	Pengadilan Tinggi Medan	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	103%	90%	89%	99%	3,78	3,86	102%	71	81,85	115%	93	98	105%	93	98	105%	75	98	131%	75	83	111%	3,00	3,65	122%
8	099204	0800	Pengadilan Tinggi Padang	96%	98%	102%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	71%	79%	3,78	3,83	101%	71	81,33	115%	93	94,7	102%	93	86,86	93%	75	81,25	108%	75	85	113%	3,00	3,37	112%
9	400492	0900	Pengadilan Tinggi Riau	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	52%	58%	3,78	3,96	105%	71	81,58	115%	93	100	108%	93	100	108%	75	85	113%	75	85	113%	3,00	3,2	107%
10	400504	1000	Pengadilan Tinggi Jambi	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	100%	111%	3,78	4	106%	71	79	111%	93	100	108%	93	100	108%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,75	125%
11	099225	1100	Pengadilan Tinggi Palembang	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	76%	85%	3,78	3,99	106%	71	84,87	120%	93	95,14	102%	93	98,25	106%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,175	106%
12	400365	1200	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	81%	90%	3,78	4	106%	71	80,63	114%	93	97,72	105%	93	85,8	92%	75	100	133%	75	100	133%	3,00	3,1	103%
13	400252	1300	Pengadilan Tinggi Pontianak	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	77%	85%	3,78	3,89	103%	71	87,26	123%	93	99	106%	93	89,4	96%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,625	121%
14	400359	1400	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	78%	86%	3,78	3,96	105%	71	83,98	118%	93	99,08	107%	93	96,41	104%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,35	112%
15	099253	1500	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	104%	90%	87%	97%	3,78	3,98	105%	71	81,63	115%	93	98,77	106%	93	94,99	102%	75	100	133%	75	82	109%	3,00	3,25	108%
16	400529	1600	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	54%	60%	3,78	3,94	104%	71	84,24	119%	93	98,84	106%	93	90,46	97%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,6	120%
17	099313	1700	Pengadilan Tinggi Manado	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	78%	87%	3,78	3,87	102%	71	77,33	109%	93	100	108%	93	100	108%	75	100	133%	75	91,49	122%	3,00	3,68	123%
18	400535	1800	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	96%	102%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	103%	90%	79%	88%	3,78	3,90	103%	71	86,93	122%	93	98,63	106%	93	94,01	101%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,325	111%
19	099419	1900	Pengadilan Tinggi Makassar	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	76%	84%	3,78	3,64	96%	71	78,69	111%	93	100	108%	93	85,83	92%	75	93,73	112%	75	72,2	98%	3,00	2,95	98%
20	400541	2000	Pengadilan Tinggi Kendari	96%	99%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	103%	90%	79%	88%	3,78	3,9	103%	71	79,53	112%	93	97,66	105%	93	84,37	91%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	4	133%
21	099692	2100	Pengadilan Tinggi Ambon	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	103%	90%	66%	73%	3,78	3,97	105%	71	82,2	116%	93	93	100%	93	93	100%	75	96,26	128%	75	96,26	128%	3,00	3,2	107%
22	099774	2200	Pengadilan Tinggi Denpasar	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	83%	93%	3,78	3,91	103%	71	82,17	116%	93	99,97	107%	93	99,15	107%	75	100	133%	75	83,5	111%	3,00	3,535	118%
23	400560	2300	Pengadilan Tinggi Mataram	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	74%	83%	3,78	3,87	102%	71	85,05	120%	93	98,99	106%	93	93,33	100%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,33	111%
24	400246	2400	Pengadilan Tinggi Kupang	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	52%	58%	3,78	3,97	105%	71	79,92	113%	93	100	108%	93	100	108%	75	100	133%	75	86,62	115%	3,00	3,125	104%
25	400023	2500	Pengadilan Tinggi Jayapura	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	57%	64%	3,78	3,85	102%	71	76,44	108%	93	97,99	105%	93	87,37	95%	75	100	133%	75	77,7	104%	3,00	3,2	107%
26	400513	2600	Pengadilan Tinggi Bengkulu	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	77%	86%	3,78	3,99	106%	71	77,1	109%	93	98,18	106%	93	94,24	101%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,4	113%
27	664123	2800	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	100%	111%	3,78	3,8	101%	71	84,72	119%	93	98,86	106%	93	91,17	98%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,2	107%
28	663399	2900	Pengadilan Tinggi Banten	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	103%	90%	20%	22%	3,78	3,88	103%	71	82,3	116%	93	98,64	106%	93	99,68	107%	75	100	133%	75	93,81	125%	3,00	3,5	117%
29	663404	3000	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	63%	71%	3,78	3,95	104%	71	84,61	119%	93	99,97	107%	93	98,3	106%	75	100	133%	75	94,24	126%	3,00	3,6	120%
30	664540	3100	Pengadilan Tinggi Gorontalo	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	100%	111%	3,78	3,96	105%	71	74,14	104%	93	97,57	105%	93	93,19	100%	75	92,14	123%	75	84,69	113%	3,00	3,64	121%
31	526707	3200	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	43%	48%	3,78	3,97	105%	71	83,88	118%	93	100	108%	93	89,94	97%	75	100	133%	75	88,68	118%	3,00	3,25	108%
32	526717	3300	Pengadilan Tinggi Papua Barat	96%	97%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	67%	75%	3,78	3,72	98%	71	80	113%	93	89,42	96%	93	89,86	97%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,1	103%
33	526713	3400	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	73%	81%	3,78	3,99	106%	71	84,01	118%	93	90,2	97%	93	91,77	99%	75	100	133%	75	92,1	123%	3,00	3,475	116%
34	526721	3500	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	86%	90%	90%	72%	80%	3,78	3,92	104%	71	88,62	125%	93	94,36	101%	93	94,36	101%	75	92,5	123%	75	92,5	123%	3,00	3,35	112%
RATA-RATA NASIONAL				96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	103%	90%	73%	81%	3,78	3,90	103%	71,00	81,62	115%	93,00	97,21	105%	93,00	92,63	100%	75,00	97,44	130%	75,00	86,86	116%	3,00	3,37	112%

Catatan:
- **Target yang tertera merupakan target nasional Renstra MA 2025-2026**

Jakarta, 20 Februari 2026
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

10.

SK PENETAPAN BENCHMARK PENGADILAN TINGKAT BANDING TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1665/DJU/SK.OT1.6/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN BENCHMARK KINERJA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola peradilan Umum yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan adanya suatu parameter kinerja nasional sebagai pembanding ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum;

b. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, perlu ditetapkan tolok ukur (*benchmark*) kinerja pada pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Penetapan *Benchmark* Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

3.Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Intansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2041/DJA/SK.RA1.3/X/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENETAPAN *BENCHMARK* KINERJA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

KESATU...

KESATU : Menetapkan *Benchmark* Kinerja bagi Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Benchmark* Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai parameter kinerja pembanding dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pada Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 12 November 2025

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

BAMBANG MYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1665/DJU/SK.OT1.6/XI/2025
TANGGAL : 12 November 2025

BENCHMARK KINERJA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Benchmark kinerja Adalah suatu ukuran yang digunakan sebagai parameter kinerja pembanding (tolok ukur) untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja seluruh pengadilan di lingkungan pengadilan Umum, baik itu Pengadilan Tingkat Banding.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
3. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur berdasarkan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
5. Sasaran Kinerja adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata, yang mencerminkan pengaruh dari hasil pelaksanaan suatu kegiatan.
6. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.
7. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
8. Pengukuran Kinerja adalah merupakan upaya membandingkan antara Target Kinerja yang diharapkan dengan realisasi dan dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulanan/semester/tahun).
9. Reviu Perjanjian Kinerja adalah proses penelaahan kembali terhadap isi, struktur, dan komitmen kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja, guna memastikan bahwa dokumen tersebut tetap relevan, realistis, selaras dengan kebijakan organisasi, serta dapat dijadikan dasar pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja.
10. Reviu Sheet adalah instrumen atau lembar yang digunakan untuk meninjau, memeriksa dan mengevaluasi terhadap suatu dokumen yang sudah ditetapkan.
11. Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Umum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penetapan *Benchmark* Kinerja bagi Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum dimaksudkan sebagai pedoman nasional dalam mengukur, membandingkan, dan mengevaluasi capaian kinerja satuan kerja peradilan Umum secara obyektif, terukur, dan berkesinambungan.
2. Penetapan *Benchmark* Kinerja bagi Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum memiliki tujuan sebagai berikut:
   a. Menyediakan tolok ukur nasional;
   b. Mewujudkan keseragaman dan konsistensi dalam sistem pengukuran dan pelaporan kinerja di seluruh satuan kerja peradilan Umum;
   c. Mendorong peningkatan kinerja melalui penetapan parameter target kinerja nasional;
   d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja peradilan, selaras dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung; dan
   e. Mendorong terwujudnya peradilan umum yang unggul dan modern melalui penguatan tata kelola berbasis data kinerja dan hasil nyata.

BAB III
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penetapan *Benchmark* Kinerja bagi Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum meliputi:

1. Aspek Kinerja Utama
   Mencakup seluruh indikator kinerja yang bersinggungan langsung dengan tugas dan mandat pengadilan (*core business*). Aspek ini menekankan peran dari Mahkamah Agung RI selaku pemegang kekuasaan kehakiman dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparsial. Dimana proses penegakkan hukum dilakukan secara berkepastian, setara dan berkeadilan agar dapat terwujud pelayanan hukum yang memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

2. Aspek Kinerja Pendukung
   Mencakup seluruh indikator kinerja yang sifatnya sebagai pendukung, yang berfokus pada praktik transparansi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan professional.

BAB IV
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025
Tujuan 1 :	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsi dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara (perdata Umum) secara tepat waktu **Rumus/ kamus indikator** Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	96,46
	1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju **Rumus/ kamus indikator** Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	100
	1.3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan **Rumus/ kamus indikator** Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	90,11
	1.4 Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court **Rumus/ kamus indikator** Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	95,76
	1.5 Persentase penyelesaian perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-berpadu **Rumus/ kamus indikator** Mengacu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025	89,93
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan **Rumus/ kamus indikator** Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	3,78
Tujuan 2 :	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan **Rumus/ kamus indikator** Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	71

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan **Rumus/ kamus indikator** Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	93
	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran **Rumus/ kamus indikator** Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	75
	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan **Rumus/ kamus indikator** Mengacu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	3,00

BAB V
PENYUSUNAN, PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

1. Matriks Indikator dan Target Kinerja sebagaimana tercantum dalam ketentuan Bab IV sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja satuan kerja di Lingkungan Peradilan Umum.
2. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formula yang mencantumkan sasaran kinerja, indikator kinerja, target kinerja, dan alokasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3. pihak yang menyusun dokumen
3. Perjanjian Kinerja Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding
   Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Tingkat Banding ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
4. Perjanjian Kinerja dapat direviu atau disesuaikan bilamana terjadi kondisi sebagai berikut:
   a. Terjadinya pergantian pimpinan satuan kerja yang berwenang.
   b. Perubahan kebijakan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja (Perubahan Program/Sasaran/Indikator/Target/Anggaran).
5. Apabila terjadi perubahan pada dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka satuan kerja wajib melampirkan dokumen *Reviu Sheet* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
6. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dengan menggunakan Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
7. Pengadilan Tingkat Banding wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengukuran dan pencapaian kinerja satuan kerja di wilayah hukumnya masing-masing.
8. Evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang serta didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah diteapkan.
9. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan kinerja, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan supervisi.

BAB VI
PENUTUP

Benchmark kinerja ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

BAMBANG MYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1665/DJU/SK.OT1.6/XI/2025
TANGGAL : 12 November 2025

Format Perjanjian Kinerja Tahunan untuk Pengadilan Tingkat Banding

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

.....(1)

LOGO UNIT KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....(2)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....(3)

Jabatan : Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : .....(4)

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

.....(5),.....(6)

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	**Ketua Pengadilan Tingkat Banding**
.....(4)	**.....(3)**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....(2)
.....(1)

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target

Kegiatan	Anggaran
1	Rp .....
2	Rp .....

..... (5), ... (6)

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tingkat Banding

.....(4)

.....(3)

Petunjuk Pengisian:
(1) Pengadilan Tingkat Banding
(2) Tahun Berjalan
(3) Nama Ketua Pengadilan Tingkat Banding
(4) Nama Pimpinan Unit Eselon I
(5) Lokasi enetapan
(6) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

BAMBANG MYANTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 1665/DJU/SK.OT1.6/XI/2025
TANGGAL : 12 November 2025

Format *Reviu Sheet*

REVIU SHEET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ..... (1)
..... (2)

Nama : ..... (3)
Jabatan : ..... (4)

KOREKSI/SARAN/MASUKAN/PENJELASAN
.....
.....
.....

..... (5), ... (6)

..... (4)

..... (3)

Petunjuk Pengisian:
(1) Tahun Berjalan
(2) Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding/Tingkat Pertama
(3) Nama Ketua Pengadilan Tingkat Banding/Tingkat Pertama
(4) Jabatan Ketua Pengadilan Tingkat Banding/Tingkat Pertama
(5) Lokasi Penetapan
(6) Tanggal, Bulan, dan Tahun Penetapan

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM

BAMBANG MYANTO

11.

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

No.	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme Penyusunan	1. Lkj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	✓
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	—

		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawaban tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	–
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	–
		10. IKU dan IK telah SMART	✓

Semarang, 26 Februari 2026

Pereviu I	Pereviu II
R. Seno Soeharjono Santoso, S.H., M.H	Drs. Muhamad Ashar, M.H.